

**PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 1993-1999**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

**PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 1993-1999**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



**Firman Sahrudin**

**NIM: 212104040019**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

**PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 1993-1999**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh:

**Firman Sahrudin**  
**NIM: 212104040019**

Disetujui Pembimbing

**Dr. Win Usuluddin, M.Hum.**  
**NIP. 197001182008011012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

**PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 1993-1999**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan Studi Islam  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Selasa  
Tanggal: 23 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, M.A.  
NIP. 198510312019031006

Sekretaris



Anggi Trivina Palupi, M.Pd.  
NIP. 199205192022032005

Anggota

1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.

2. Dr. Win Usuluddin, M.Hum.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. H. Abidul Asror, M.Ag.  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ”

Artinya: “Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”  
(QS Al-Anbiya’ 21:30)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Anbiya (21): 30 dalam (<https://quran.nu.or.id/al-anbiya>), 25/12/2025.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk Almamater tercinta  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushluddin Adab dan  
Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
serta para akademisi Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam  
di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sebagai tanda rasa syukur penulis, semua pengalaman selama proses penulisan skripsi akan penulis jadikan sebagai refleksi atas diri penulis untuk kemudian akan penulis implementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku konstruktif dan produktif untuk kebaikan dan perbaikan semua warga bangsa.

Dalam proses perjuangan dan kerja keras yang penulis lalui agar skripsi ini terselesaikan dengan lancar, mengantarkan pada sebuah kesuksesan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo Tahun 1993-1999”**. Kesuksesan dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak memiliki hambatan melainkan penulis harus selalu berjuang lebih keras hingga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Sarjana dengan gelar S.Hum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora serta seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi

Sejarah dan Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini; atas bimbingan serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan, serta kesabaran dalam membimbing, membantu, memotivasi, dan memberikan arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik.
4. Bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas bimbingan dan motivasi, serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan. Tentunya segalanya yang telah diberikan kepada penulis akan terus dikembangkan dan diamalkan sebaik mungkin.
6. Seluruh pegawai lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas segala informasi-informasinya yang telah diberikan.



7. Kedua orang penulis yaitu Bapak Fathullah dan Ibu Hemilia yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan studi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh staf karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini. Juga kepada seluruh staf karyawan Bakesbangpol Kota Probolinggo yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada juga untuk seluruh staf karyawan Perpustakaan Kota Probolinggo yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini, juga kepada seluruh staf karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini. Terima kasih pula kepada seluruh staf karyawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini. Tidak lupa terima kasih kepada seluruh staf karyawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada juga seluruh staf karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini juga kepada seluruh staf Perpustakaan Medayu Agung Surabaya yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk bahan penulisan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Program Studi Sejarah Peradaban Islam dan rekan-rekan satu dosen bimbingan angkatan 2021, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tak perlu penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaannya membersamai penulis untuk mengenyam ilmu di bangku perkuliahan. Terima kasih kepada mahasiswi Halimatus Syakdia dengan NIM 212101030010 karena telah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini dan terima kasih juga karena sudah menjadi teman berbagi cerita bagi penulis juga kepada mahasiswa Muhammad Kholil dengan NIM 21210106007 yang selalu menjadi teman baik dalam berbagi cerita dengan penulis.

Jember, 27 November 2025  
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Firman Sahrudin**  
**212104040019**

## ABSTRAK

Firman Sahrudin, 212104040019, 2025. *Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo Tahun 1993-1999*.

**Kata-kata Kunci:** PDAM, Infrastruktur, Air, Probolinggo.

Air merupakan kebutuhan vital yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup umat manusia di segala zaman dan di setiap peradaban yang ada. Krisis dan keterbatasan air membuat manusia berusaha untuk mengatasinya dengan berbagai cara yang dapat dilakukan misalnya dengan mendirikan perusahaan pengelolaan sistem penyediaan air bersih seperti PDAM Bayuangga Kota Probolinggo. Perkembangan PDAM Bayuangga Kota Probolinggo memiliki dampak yang mempengaruhi keberlangsungan pengelolaan dan distribusi air untuk dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar Kota Probolinggo periode tahun 1993-1999.

Fokus penelitian ini: (1) Apa yang melatar-belakangi perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo pada tahun 1993-1999?. (2) Apa dampak perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga Kota Probolinggo bagi masyarakat sekitar pada tahun 1993-1999?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis latarbelakang perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo pada tahun 1993-1999. (2) Untuk menganalisis dampak perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo bagi masyarakat sekitar pada tahun 1993-1999.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah bangunan infrastruktur sistem penyediaan air di Kota Probolinggo, baik berupa menara air, rumah bor, mesin pompa air, perpipaan, unit *ground* dan lain-lain. Kemudian terdapat sumber sekunder seperti jejak digital seperti foto-foto, arsip dan dokumen dari pemerintah daerah, Badan Pusat Statistika, lembaga pendidikan dan Perumdam Kota Probolinggo sebagai referensi dalam menunjang proses verifikasi terhadap data penelitian ini.

Perkembangan PDAM Bayuangga Kota Probolinggo pada 1993–1999 meliputi peningkatan layanan distribusi air dan peralihan sistem dari menara air ke pompa bertekanan tinggi. Namun, perkembangan ini terhambat oleh krisis moneter 1997-1998 yang menyebabkan penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan. Tahun 1999 juga menjadi masa transisi dari orde baru ke reformasi, yang memengaruhi kebijakan pengelolaan PDAM.

Perkembangan PDAM Bayuangga Kota Probolinggo berdampak positif bagi masyarakat Kota Probolinggo dengan terpenuhinya kebutuhan air di wilayah pinggiran pantai yang sebelumnya tidak terjangkau, peningkatan kualitas air yang mendukung kesehatan, serta bertambahnya jumlah sambungan dan konsumsi air untuk kebutuhan sehari-hari.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Studi Terdahulu .....	5
G. Kerangka Konseptual .....	14
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN KOTA PROBOLINGGO .....</b>	<b>25</b>

A. Sejarah Kota Probolinggo.....	25
B. Letak Geografis .....	30
C. Demografi .....	31
D. Keadaan Sosial Ekonomi .....	38
<b>BAB III PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM</b>	
<b>KAWASAN KOTA PROBOLINGGO.....</b>	<b>45</b>
A. Masa Orde Baru .....	45
B. Masa Awal Reformasi .....	51
<b>BAB IV DAMPAK PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR</b>	
<b>MINUM KOTA PROBOLINGGO.....</b>	<b>54</b>
A. Masa Akhir Orde Baru.....	54
B. Masa Awal Reformasi .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>SURAT PERNYAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>79</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Probolinggo antara tahun 1817-1855 .....	25
Gambar 2.2 Peta Probolinggo tahun 1881 .....	27
Gambar 3.1 Kunjungan Menteri Ke Sumber Air Ronggojalu.....	45
Gambar 3.2 Arsip Jumlah Langganan Air Minum Menurut Jenis Pemakai dan Besarnya Volume yang Digunakan Periode 1976-1977.....	46
Gambar 3.3 Bu Wuryaningsih, SH. Periode tahun ( 1992-1996 ).....	48
Gambar 3.4 Bapak Drs. H. Johny Haryanto Periode tahun ( 1996-2001 ).....	50
Gambar 3.5 Bagian sambungan pipa tahun 1978 yang sudah tidak berfungsi .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu.....	10
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Probolinggo Periode 1993-1999. ....	33
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non-Produktif di Kota Probolinggo Periode 1993-1999. ....	34
Tabel 4.1 Perkembangan jumlah pelanggan, jumlah air minum yang diproduksi dan di salurkan, serta pemasukan PDAM Kota Probolinggo tempo 1993-1999 .....	64



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perusahaan daerah air minum adalah perusahaan yang menghasilkan pelayanan jasa distribusi air kepada masyarakat di beberapa daerah tertentu, dimana air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak serta merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Krisis dan keterbatasan air membuat manusia berusaha untuk mengatasinya dengan berbagai cara yang dapat dilakukan misalnya dengan mendirikan perusahaan pengelolaan sistem penyediaan air bersih seperti PDAM Bayuanga Kota Probolinggo. Perkembangan PDAM Bayuanga Kota Probolinggo memiliki dampak yang mempengaruhi keberlangsungan pengelolaan dan distribusi air untuk dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar Kota Probolinggo dari masa ke masa.<sup>2</sup>

Pengelolaan infrastruktur penyediaan air bersih di Probolinggo mengalami transisi dan perkembangan pada periode 1975, yang ditandai dengan peralihan dari sistem penyediaan air bersih pra kemerdekaan berbahan bakar solar menuju sistem distribusi air bersih yang lebih modern dan dikelola nasional melalui pemerintah daerah. Pada tahun berikut, PDAM Kota Probolinggo resmi didirikan melalui Peraturan Daerah No.13 tahun 1975. Sebelum itu, distribusi

---

<sup>2</sup> Roni Syaifutra dkk. "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016", dalam jurnal: *JIM*, Vol. 2 No. 3 (2017), 85-86, di download melalui: (<https://core.ac.uk/download/pdf/156933837.pdf>).



air masih menggunakan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dengan memanfaatkan mesin pompa berbahan bakar solar dari sumber air Ronggojalu menuju menara air lalu disalurkan ke masyarakat menggunakan tekanan gravitasi.<sup>3</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum Bayuanga Kota Probolinggo pada tahun 1993 memiliki peningkatan dalam jumlah konsumen, dahulunya menara air ini berfungsi sebagai pusat penampungan air sebelum di distribusikan ke konsumen namun, sudah tidak difungsikan lagi karena kapasitas tangki menara sudah tidak mencukupi sehingga air yang diproduksi di pusat Desa Ronggojalu langsung didistribusikan ke konsumen.<sup>4</sup> Pusat produksi serta sumber air yang berada di Desa Ronggojalu dahulunya disebut dengan *waterleiding* yang berfungsi sebagai rumah pompa yang berisi mesin-mesin penyalur air dari sumber mata air hingga ke menara air. Rumah pompa ini juga dibangun dengan gaya arsitektur rasionalisme yang ketat dengan ciri khasnya berupa bentuk sederhana tanpa menggunakan banyak ornamen.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian telah membahas tentang perkembangan perusahaan daerah air minum meliputi modernisasi sistem penyediaan air minum berupa menara air, pipanisasi, mesin pompa dan pengelolaan sumber air sebagai fasilitas distribusi air peninggalan kolonial yang bertahan hingga masa awal reformasi,

---

<sup>3</sup> Pudam-Bayuanga, 14 Mei 2025.

<sup>4</sup> Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kota Probolinggo, *Menara Air Kota Probolinggo Sebagai Struktur Cagar Budaya*, (Kota Probolinggo: Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2019).

<sup>5</sup> Olivier Johannes Raap, *Kota di Djawa Tempo Doeloe*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), 261.

namun kajian spesifik mengenai perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga Kota Probolinggo periode 1993-1999 masih sangat terbatas. Periode ini menarik untuk dikaji karena merepresentasikan masa transisi penting dalam pengelolaan dan perkembangan infrastruktur distribusi air bersih di Probolinggo dari zaman orde baru beralih ke sistem saluran air yang lebih modern dan efisien pada masa awal reformasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai meningkat.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa yang melatar-belakangi perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo tahun 1993-1999?
2. Apa dampak perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo bagi masyarakat sekitar tahun 1993-1999?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis latar-belakang perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo tahun 1993-1999.
2. Untuk menganalisis dampak perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo bagi masyarakat sekitar tahun 1993-1999.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi oleh aspek spasial maupun aspek temporal agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ingin

dikemukakan.<sup>6</sup> Untuk itu, peneliti memberikan batasan-batasan spasial maupun temporal sebagai berikut:

1. Batas temporal penelitian ini, yang dimulai dari tahun 1993 hingga 1999.

Peneliti mengambil latar waktu tersebut karena merupakan waktu berlangsungnya proses perkembangan sistem penyediaan air minum secara tradisional pada fasilitas PDAM Kota Probolinggo yang pada awalnya menggunakan pompa berbahan bakar solar dan di salurkan ke menara air menggunakan tenaga gravitasi menuju masyarakat beralih menjadi sistem distribusi air yang lebih modern dimana digantikan dengan pompa distribusi bertenga listrik dan langsung disalurkan dari sumber air Ronggojalu menuju masyarakat melalui pipa-pipa yang tersedia menuju pusat kota dan sekitarnya.

2. Batas spasial dalam penelitian ini terdapat di wilayah Kota Probolinggo karena objek material yang diteliti berlokasi di wilayah tersebut serta menganalisis dampak perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga pada distribusi air bersih untuk keberlangsungan taraf kehidupan masyarakat di wilayah Kota Probolinggo.

---

<sup>6</sup> Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah", dalam jurnal *Seri Publikasi Pembelajaran* Vol. 1. No. 1 (2021), 1-4, di download melalui: ([https://www.researchgate.net/profile/WulanSukmana/publication/351097486\\_METODE\\_PENELITIAN\\_SEJARAH/links/608688218ea909241e2662fb/METODE-PENELITIAN\\_SEJARAH.pdf](https://www.researchgate.net/profile/WulanSukmana/publication/351097486_METODE_PENELITIAN_SEJARAH/links/608688218ea909241e2662fb/METODE-PENELITIAN_SEJARAH.pdf)).

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan sekaligus informasi penting untuk menambah khazanah keilmuan sekaligus pemahaman bagi masyarakat khususnya kepada mahasiswa sejarah terlebih seputar pembahasan tentang perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuanga di Kota Probolinggo dalam kurun waktu 1993 hingga 1999. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang bagaimana latarbelakang perkembangan perusahaan air minum di kota Probolinggo hingga dampak dan pengaruhnya dalam distribusi air untuk kehidupan masyarakat Probolinggo tempo dulu. Dari penelitian ini juga, peneliti berharap besar agar penelitian ini menjadi penyempurnaan bagi karya tulis selanjutnya, menjadi riset bagi para mahasiswa sejarah untuk terus melengkapi dan mengembangkan penelitian dalam konteks ini.<sup>7</sup>

## F. Studi Terdahulu

Peneliti memberikan ringkasan beberapa penelitian sebelumnya dengan mempertimbangkan relevansi tema, atau objek material atau objek formal penelitian yang akan diteliti. Peneliti kemudian memberikan ringkasan penelitian yang telah di publikasikan seperti skripsi, jurnal, dan sebagainya. Langkah terpenting dalam melakukan penelitian adalah dengan menemukan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang relevan di saat menjelaskan. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Reni Anisa Hidayati, “Perubahan Sosial Pada Masyarakat Lumajang Di Dunia Fotografi Tahun 1935-2011”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 9.

1. Karya yang ditulis oleh Roni Syaifutra, Zainal Abidin, dan Nurasiah dari Program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2017 yang berjudul “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016”. Pada penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan PDAM Tirta Daroy yang sudah beroperasi dalam bidang penyaluran air bersih di Kota Banda Aceh berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1975 pada tanggal 24 Februari 1975. Perkembangan tersebut meliputi beberapa aspek antara lain: aspek pergantian direktur, penambahan karyawan, kenaikan gaji karyawan, kenaikan jumlah pelanggan hingga penambahan sarana dan prasarana.<sup>8</sup> Persamaan pada penelitian ini terdapat pada objek kajian yang meneliti perusahaan penyediaan air minum. Persamaan lainnya terdapat pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode sejarah. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada batasan spasial dan temporal yang dipilih dimana menggunakan batasan spasial Kota Banda Aceh dan temporal pada tahun 1975-2016 sedangkan peneliti lebih berfokus pada batasan Kota Probolinggo pada tahun 1993-1999.
2. Karya yang ditulis oleh Evi Duwi Agustriani dari Program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tahun 2017 yang berjudul “Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota Pasuruan 1982-2004”. Penelitian ini menjelaskan tentang latar

---

<sup>8</sup> Roni Syaifutra dkk. “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016”, dalam jurnal: *JIM*, Vol. 2 No. 3 (2017), 84, di download melalui: (<https://core.ac.uk/download/pdf/156933837.pdf>).

belakang berdirinya PDAM Tirta ini adalah untuk memperluas jaringan dan tekanan air bersih di wilayah pesisir. Selain itu pengadaan air bersih yang selama ini ditangani oleh Perusahaan SAM (Saluran Air Minum) Kota Pasuruan perlu untuk ditingkatkan baik kemampuan produksi maupun sistem distribusinya, dan perlu adanya penambahan modal yang tidak sedikit, serta perlu adanya suatu sistem organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat itu.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terdapat pada pendekatan metode sejarah yang digunakan terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Persamaan lainnya terdapat pada objek material yang dikaji berupa perusahaan penyediaan air bersih yang di kelola oleh badan usaha milik daerah. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada batasan temporal serta spasial dimana pada penelitian ini berlokasi di Pasuruan dengan periode tahun 1982 hingga 2004 sedangkan penelitian ini bertempat di Kota Probolinggo dengan periode tahun 1993 hingga 1999.

3. Karya yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Atho'illah dan Titiek Suliyati dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tahun 2022 yang berjudul "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Paguripan Kabupaten Kendal sebagai Penyedia Air Baku, 1986-2020". Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan PDAM Tirta Panguripan dan faktor-faktor pendukungnya. PDAM Tirta

---

<sup>9</sup> Evi Duwi Agustriani. "Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota Pasuruan 1982-2004", dalam jurnal: *Avatara*, Vol. 5 No. 1 (2017), 1377, di download melalui: (<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/17670>).



merupakan penyedia air bersih dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kendal. Perkembangan terjadi pada segi nama perusahaan, jumlah pegawai, dan jumlah pelanggan yang turut mempengaruhi perubahan struktur organisasi tata kerja perusahaan.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang ditulis oleh peneliti terdapat pada objek material penelitian yang berfokus kepada perusahaan penyedia jasa distribusi air bersih serta persamaan lainnya terdapat pada bagian metode sejarah yang terdiri dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada batasan spasial dan temporal yaitu bertempat di Kabupaten Kendal dalam tempo tahun 1986 hingga 2020, sedangkan peneliti lebih berfokus pada kajian yang bertempat di Kota Probolinggo dalam tempo tahun 1993 hingga 1999.

4. Karya yang ditulis oleh Zafira Marshanda dan Zul Asri dari Program studi Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Padang tahun 2023 yang berjudul “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Solok Tahun 1984-2020”. Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan PDAM Tirta Dharma Kota Solok pada tahun 1984 hingga 2020. Karya ini membahas tentang perkembangan PDAM Kota Solok dari tahun ke tahun sesuai dengan era kepemimpinannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan PDAM Kota Solok yang mengalami

---

<sup>10</sup> Muhammad Rizqi Athoillah dan Titiek Suliyati. “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun 1986-2020”, dalam jurnal: *Historiografi*, Vol. 3 No. 1 (2022), 21, di download melalui: (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/historiografi/article/download/37615/30650>).

peningkatan dari sektor sarana infrastruktur air bersih, produksi air bersih, dan cakupan pelayanan air bersih. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terdapat pada metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan dari heuristik, kritik sumber, interpretasi lalu historiografi. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan secara kualitatif dalam penelitiannya. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada batasan temporal dan spasial berupa di Kota Solok pada tahun 1984 hingga 2020. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti dengan batasan temporal tahun 1993 hingga 1999 dan batasan spasial di Kota Probolinggo.<sup>11</sup>

5. Karya yang ditulis oleh Fitri Fatonah, Meri Erlina M.Pd. dan Dr. Kukun Rahmat, M.Si. dari Universitas Persatuan Islam tahun 2025 yang berjudul “Peran PDAM Cisurupan Dalam Pengembangan Air Bersih dan Dampaknya di Kampung Palalangan (1992-2003)”. Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan PDAM Cisurupan di Kampung Palalangan pada tahun 1992-2003. Penelitian ini menggambarkan kondisi masyarakat sebelum adanya PDAM, penelitian ini juga menjelaskan latar belakang pembangunannya, serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terdapat pada metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan

---

<sup>11</sup> Zafira Mashanda, Zul Asri. “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Solok Tahun 1984-2020”, dalam jurnal: *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 5 No. 1 (2023), 51, di download melalui: (<http://jurnal.ensiklopediaku.org>).



dari heuristik, kritik sumber, interpretasi lalu historiografi. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan secara kualitatif dalam penelitiannya. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada batasan temporal dan spasial berupa di Kampung Palalangan, Kabupaten Cianjur pada tahun 1992 hingga 2003. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis terdapat pada batasan temporal tahun 1993 hingga 1999 dan batasan spasial di Kota Probolinggo.<sup>12</sup>

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Roni Syaifutra, Zainal Abidin, dan Nurasih dari Program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2017 yang berjudul “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh	Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan PDAM Tirta Daroy yang sudah beroperasi dalam bidang penyaluran air bersih di Kota Banda Aceh berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1975 pada tanggal 24 Februari 1975. Perkembangan tersebut meliputi beberapa aspek	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada objek kajian yang meneliti perusahaan penyediaan air minum yang masih relevan dengan objek kajian saluran air bersih. Persamaan lainnya terdapat pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode sejarah.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada batasan spasial dan temporal yang dipilih dimana menggunakan batasan spasial Kota Banda Aceh dan temporal pada tahun 1975-2016 sedangkan peneliti lebih berfokus pada batasan Kota Probolinggo pada tahun 1993-1999.

<sup>12</sup> Fitri Fatonah dkk. “Peran PDAM Cisarupan Dalam Pengembangan Air Bersih dan Dampaknya di Kampung Palalangan (1992-2003)”, dalam jurnal: *Pendidikan, Sejarah, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 1 (2025), 56, di download melalui: (<https://zeitgeist-unipi.com>).

	Tahun 1975-2016”.	antara lain: aspek pergantian direktur, penambahan karyawan, kenaikan gaji karyawan, kenaikan jumlah pelanggan hingga penambahan sarana dan prasarana.		
2.	Evi Duwi Agustriani dari Program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tahun 2017 yang berjudul “Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota Pasuruan 1982-2004”.	Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang berdirinya PDAM Tirta ini adalah untuk memperluas jaringan dan tekanan air bersih di wilayah pesisir. Selain itu pengadaan air bersih yang selama ini ditangani oleh Perusahaan SAM (Saluran Air Minum) Kota Pasuruan perlu untuk ditingkatkan baik kemampuan produksi maupun sistem distribusinya, dan perlu adanya	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terdapat pada pendekatan metode sejarah yang digunakan terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Persamaan lainnya terdapat pada objek material yang dikaji berupa bangunan infrastruktur penyediaan air bersih yang di kelola oleh badan usaha milik daerah.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada batasan temporal serta spasial dimana pada penelitian ini berlokasi di Pasuruan dengan periode tahun 1982 hingga 2004 sedangkan penulis meneliti bertempat di Probolinggo dengan periode tahun 1993 hingga 1999.

		penambahan modal yang tidak sedikit, serta perlu adanya suatu sistem organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat itu.		
3.	Muhammad Rizqi Atho'illah dan Titiek Suliyati dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Univeritas Diponegoro Tahun 2022 yang berjudul "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirto Paguripan Kabupaten Kendal sebagai Penyedia Air Baku, 1986-2020".	Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan PDAM Tirto Paguripan dan faktor-faktor pendukungnya. PDAM Tirto merupakan penyedia air bersih dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kendal. Perkembangan terjadi pada segi nama perusahaan, jumlah pegawai, dan jumlah pelanggan yang turut mempengaruhi perubahan struktur organisasi tata kerja perusahaan.	Persamaan penelitian ini dengan yang ditulis oleh peneliti terdapat pada objek material penelitian yang berfokus kepada fasilitas penyedia air bersih serta persamaan lainnya terdapat pada bagian metode sejarah yang terdiri dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah.	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat pada batasan spasial dan temporal yaitu bertempat di Kabupaten Kendal dalam tempo tahun 1986 hingga 2020, sedangkan peneliti lebih berfokus pada kajian yang bertempat di Kota Probolinggo dalam tempo tahun 1993 hingga 1999.
4.	Zafira Marshanda dan	Penelitian ini menjelaskan	Persamaan penelitian ini	Perbedaan dari penelitian ini

	<p>Zul Asri dari Program studi Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Padang tahun 2023 yang berjudul “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Solok Tahun 1984-2020”.</p>	<p>tentang perkembangan PDAM Tirta Dharma Kota Solok pada tahun 1984 hingga 2020. Karya ini membahas tentang perkembangan PDAM Kota Solok dari tahun ke tahun sesuai dengan era kepemimpinannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan PDAM Kota Solok yang mengalami peningkatan dari sektor sarana infrastruktur air bersih, produksi air bersih, dan cakupan pelayanan air bersih.</p>	<p>dengan yang diteliti oleh penulis terdapat pada metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan dari heuristik, kritik sumber, interpretasi lalu historiografi. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan secara kualitatif dalam penelitiannya.</p>	<p>dengan yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada batasan temporal dan spasial berupa di Kota Solok pada tahun 1984 hingga 2020. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti dengan batasan temporal tahun 1993 hingga 1999 dan batasan spasial di Kota Probolinggo.</p>
5.	<p>Fitri Fatonah, Meri Erlina M.Pd. dan Dr. Kukun Rahmat, M.Si. dari Univeritas Persatuan Islam tahun 2025 yang berjudul “Peran PDAM</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan PDAM Cisirupan di Kampung Palalagon pada tahun 1992-2003. Penelitian ini</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terdapat pada metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis terdapat pada batasan temporal tahun 1993 hingga 1999 dan batasan spasial di Kota Probolinggo</p>

	Cisurupan Dalam Pengembangan Air Bersih dan Dampaknya di Kampung Palalargon (1992-2003)".	menggambarkan kondisi masyarakat sebelum adanya PDAM, penelitian ini juga menjelaskan latar belakang pembangunannya, serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya.	dari heuristik, kritik sumber, interpretasi lalu historiografi. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan secara kualitatif dalam penelitiannya. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada batasan temporal dan spasial berupa di Kampung Palalargon, Kabupaten Cianjur pada tahun 1992 hingga 2003.	
--	---	--	---	--

Distingsi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Bayuangga di Kota Probolinggo Tahun 1993-1999” dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas terletak pada analisis historis perkembangan PDAM dalam mengelola sistem penyediaan air bersih beserta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar Kota Probolinggo.

### **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat dalam menganalisa penelitian ini sebagai berikut.

#### **1. Perkembangan Institusi**

Teori perkembangan yang dikemukakan oleh W. W. Rostow memandang pembangunan sebagai proses bertahap dari kondisi tradisional menuju masyarakat

modern melalui perubahan struktur ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. Dalam konteks penelitian ini, teori Rostow relevan untuk menganalisis perkembangan PDAM Bayuangga Kota Probolinggo tahun 1993–1999 sebagai bagian dari proses modernisasi pelayanan publik di tingkat daerah. Sebelum periode tersebut, sistem distribusi air masih bersifat tradisional dengan mengandalkan menara air dan jangkauan layanan yang terbatas, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara merata.<sup>13</sup>

Memasuki awal 1993-1999, perkembangan PDAM Bayuangga dapat dipahami sebagai tahap perkembangan sebagaimana dikemukakan Rostow, yaitu ditandai oleh meningkatnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pembentukan institusi pelayanan publik yang lebih terorganisasi. Latar belakang utama perkembangan PDAM pada periode ini adalah meningkatnya kebutuhan air bersih akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah perkotaan, serta tuntutan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan investasi pada sektor air minum sebagai bagian dari strategi pembangunan kota.<sup>14</sup>

Pada periode 1993–1997, PDAM Bayuangga menunjukkan ciri tahap peralihan, yang terlihat dari modernisasi sistem distribusi air melalui peralihan dari penggunaan menara air ke sistem pompa bertekanan tinggi serta perluasan jangkauan pelayanan. Perubahan ini mencerminkan upaya percepatan

---

<sup>13</sup> Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>14</sup> Rostow, W. W. (1971). *Politics and the Stages of Growth*. Cambridge: Cambridge University Press.



pembangunan institusi PDAM agar mampu menyediakan layanan air bersih secara lebih efektif dan efisien. Namun, krisis moneter tahun 1997–1998 menjadi hambatan dalam proses tersebut, yang berdampak pada penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan PDAM, meskipun secara kelembagaan PDAM tetap bertahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik.<sup>15</sup>

Pada tahun 1998–1999, perkembangan PDAM Bayuwanga dapat dipahami sebagai tahap menuju kematangan institusi, di mana PDAM harus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dan transisi politik dari Orde Baru ke era Reformasi. Peralihan kebijakan dan pola pengelolaan pada masa ini turut memengaruhi arah perkembangan PDAM, namun sekaligus memperkuat peran PDAM sebagai institusi strategis dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Probolinggo.<sup>16</sup>

Dampak perkembangan PDAM Bayuwanga bagi masyarakat Kota Probolinggo pada periode 1993–1999 tercermin dalam meningkatnya akses air bersih, terutama bagi wilayah pinggiran dan pesisir yang sebelumnya belum terjangkau layanan PDAM. Peningkatan kualitas dan kontinuitas distribusi air berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan masyarakat serta meningkatnya konsumsi air rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori Rostow, perkembangan PDAM Bayuwanga tidak hanya mencerminkan pertumbuhan institusi pelayanan publik, tetapi juga menjadi

---

<sup>15</sup> Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. London: Pearson Education.

<sup>16</sup> Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

indikator peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kota Probolinggo.<sup>17</sup>

## 2. Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers menjelaskan bahwa perubahan sosial dan kelembagaan terjadi melalui proses penyebaran inovasi, baik berupa ide, teknologi, maupun praktik baru, yang diadopsi secara bertahap oleh individu atau organisasi dalam suatu sistem sosial. Rogers menekankan bahwa adopsi inovasi tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan pengetahuan (knowledge), persuasi (persuasion), keputusan (decision), implementasi (implementation), dan konfirmasi (confirmation). Dalam konteks penelitian ini, teori difusi inovasi relevan untuk menganalisis perkembangan PDAM Bayuangga Kota Probolinggo tahun 1993–1999 sebagai proses adopsi teknologi dan sistem distribusi air yang lebih modern guna menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus berkembang.<sup>18</sup>

Latar belakang perkembangan PDAM Bayuangga pada periode 1993–1999 dapat dipahami melalui tahap awal difusi inovasi, yaitu munculnya kesadaran akan keterbatasan sistem distribusi air tradisional yang masih mengandalkan menara air dan jaringan terbatas. Pertumbuhan penduduk, perluasan wilayah kota, serta meningkatnya kebutuhan air bersih mendorong pemerintah daerah dan manajemen PDAM untuk mencari solusi baru yang lebih efektif. Pada tahap ini, inovasi berupa

---

<sup>17</sup> Inglehart, R. (1997). *Modernization and Postmodernization*. Princeton: Princeton University Press.

<sup>18</sup> Rogers, Everett M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.



penggunaan sistem pompa bertekanan tinggi dan perluasan jaringan pipa mulai diperkenalkan sebagai jawaban atas masalah distribusi air yang tidak merata. Proses ini menunjukkan bagaimana kebutuhan sosial dan tekanan lingkungan mendorong institusi publik untuk menerima dan mempertimbangkan inovasi teknologi.<sup>19</sup>

Selanjutnya, pada tahap keputusan dan implementasi, PDAM Bayuangga mulai mengadopsi inovasi distribusi air secara nyata, terutama pada pertengahan 1990-an. Peralihan dari sistem menara air ke sistem pompa modern mencerminkan adopsi inovasi oleh organisasi pelayanan publik yang berperan sebagai change agent dalam masyarakat. Inovasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif dan kelembagaan, karena memerlukan perubahan dalam pengelolaan, pembiayaan, serta pola pelayanan kepada pelanggan. Meskipun krisis moneter 1997–1998 sempat menghambat laju adopsi inovasi akibat keterbatasan sumber daya, PDAM Bayuangga tetap mempertahankan inovasi tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang pelayanan air bersih.<sup>20</sup>

Dampak perkembangan PDAM Bayuangga bagi masyarakat Kota Probolinggo dapat dianalisis melalui tahap konfirmasi dalam teori difusi inovasi, yaitu ketika inovasi yang telah diterapkan menunjukkan manfaat nyata dan memperoleh legitimasi sosial. Peningkatan jangkauan distribusi air, terutama ke wilayah pinggiran dan pesisir kota, menunjukkan bahwa inovasi distribusi air diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kontinuitas dan

---

<sup>19</sup> Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2015). *Economic Development*. London: Pearson Education.

<sup>20</sup> Osborne, David, & Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government*. Reading, MA: Addison-Wesley.

kualitas air bersih berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan masyarakat serta meningkatnya konsumsi air rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, adopsi inovasi dalam distribusi air tidak hanya memperkuat posisi PDAM Bayuangga sebagai institusi pelayanan publik, tetapi juga membawa perubahan sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat Kota Probolinggo.<sup>21</sup>

Berdasarkan perspektif teori difusi inovasi Everett M. Rogers, perkembangan PDAM Bayuangga Kota Probolinggo tahun 1993–1999 dapat dipahami sebagai proses penyebaran dan penerimaan inovasi teknologi distribusi air yang dipengaruhi oleh kebutuhan sosial, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi. Teori ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara historis mengapa PDAM Bayuangga berkembang pada periode tersebut dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat, sehingga menjadikannya kerangka analisis yang relevan dan akurat dalam penelitian sejarah pelayanan publik air bersih.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pemilihan Topik**

Dalam penelitian ini topik pembahasan yang peneliti ambil tentang perkembangan perusahaan infrastruktur publik dari zaman kolonial hingga masa awal reformasi dengan judul “Perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo Tahun 1993-1999”. Penentuan topik ini dengan sengaja dipilih oleh peneliti karena melihat fakta di lapangan mengenai adanya bangunan serta infrastruktur sistem penyediaan air minum dari zaman kolonial

---

<sup>21</sup> Inglehart, Ronald. (1997). *Modernization and Postmodernization*. Princeton: Princeton University Press.

Belanda masih tetap eksis dan terjaga hingga masa kini. Peneliti ingin menganalisis terkait latar belakang perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo dan dampaknya bagi keberlangsungan kelayakan dan taraf hidup masyarakat lokal kurun waktu 1993 hingga 1999.

## **2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan unsur metode heuristika dengan maksud untuk menguatkan penelitian dengan melihat sumber bangunan dan arsip yang sezaman. Heuristika dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: sumber primer dan sumber sekunder yang akan dijelaskan sebagai, berikut:

### **a. Sumber Primer**

Sumber primer pada penelitian ini adalah objek material berupa bangunan sistem penyediaan air minum meliputi menara air, mesin pompa, dan infrastruktur distribusi air lainnya. Menara air sendiri sudah diresmikan oleh pihak kolonial Belanda pada 1928 dan mulai berhenti beroperasi pada tahun 1993. Pemilihan sumber primer berupa peninggalan bangunan infrastruktur penyediaan air bersih merupakan data yang ditemukan di tempat penelitian ini berlangsung, dan data tersebut diambil sesuai dengan ruang dan waktunya.

### **b. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa foto-foto sistem penyediaan air minum, wawancara dengan beberapa masyarakat lokal dan pensiunan yang bekerja di menara air tersebut, beserta arsip, jurnal maupun skripsi yang membahas tentang perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga Kota Probolinggo.

Peneliti memilih data tersebut karena merupakan data pendukung yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini.

### **3. Verifikasi (Kritik Sumber)**

Dalam penelitian ini peneliti mengkritisi sumber berdasarkan 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:

#### **a. Kritik Eksternal**

Peneliti dalam penelitian ini akan mengkritisi data secara eksternal, yaitu: data berupa dokumen atau arsip digital yang menyatakan adanya kegiatan terkait penyaluran air bersih dan konsumsinya pada waktu tempo dulu. Peneliti mengkritik dengan melihat fisik dari arsip digital tersebut, seperti kualitas digitalisasi kertasnya dari arsip tersebut dan lainnya. Peneliti mengkritik secara eksternal data yang diperoleh karena untuk memastikan keaslian dari data tersebut, dan memastikan bukan data yang dibuat oleh pihak yang tidak berwajib.

#### **b. Kritik Internal**

Peneliti dalam penelitian ini akan mengkritisi data secara internal, yaitu : sumber dokumen berupa arsip digital. Peneliti memverifikasi isi dari arsip digital tersebut, seperti: tanggalnya, isi arsip tersebut apakah sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan dan terjadi pada pengelolaan PDAM. Pada bagian ini juga peneliti memastikan bahwa data ini benar-benar data yang valid atau tidak supaya nantinya dapat dijadikan sebagai data sumber dalam penelitian ini.

### **4. Interpretasi (Analisis Sumber)**

Peneliti dalam tahap menganalisis sumber lisan berupa wawancara beberapa karyawan dan seorang pensiunan dari PDAM Kota Probolinggo. Peneliti sebelum

melakukan sintesis, menganalisis terlebih dahulu apakah data dari beberapa karyawan dan pensiunan dari PDAM Kota Probolinggo sesuai dengan data lainnya yang berasal dari arsip digital yang didapatkan dari sumber website resmi pihak pemerintah daerah. arsip atau dokumen yang tersimpan di PDAM Kota Probolinggo dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo perlu dilakukan analisis terlebih dahulu dengan dokumen lain yang memiliki tahun terbit yang sama. Peneliti menganalisis data-data tersebut karena sebelum dilakukannya penulisan atau historiografi data harus dianalisis, dan melakukan penafsiran terhadap fakta atau sumber yang diperoleh.

## **5. Historiografi (Penulisan Sejarah)**

Historiografi adalah cara kepenulisan, pelaporan atau pemaparan dari hasil akhir penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dari hasil itu yang akan memberikan gambaran secara jelas mengenai proses penelitian sejak awal (fase perencanaan) sampai pada penarikan kesimpulan. Hasil dari penulisan ini akan menjelaskan dan menganalisis tentang “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Bayuangga di Kota Probolinggo Tahun 1993-1999”.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini akan disusun dengan bentuk laporan yang disusun secara sistematis supaya hasilnya dapat dipahami dengan mudah. Menyusun per-BAB secara sistematis dan logis merupakan bagian dari struktur perencanaan. Adapun dalam penelitian ini terdapat lima BAB yang disusun secara sistematis guna mempermudah pembahasan penulisan penelitian, sebagai berikut:

**BAB I** pendahuluan, peneliti menyajikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian, rumusan masalah dan gambaran secara umum tentang pembahasan dalam penulisan ini.

**BAB II** pembahasan mengenai gambaran umum kawasan Kota Probolinggo. Dalam pembahasan ini meliputi sejarah Kota Probolinggo, letak geografis, demografi dan keadaan sosial ekonomi sebagai bentuk spasial yang mencakupnya.

**BAB III** pembahasan mengenai latar belakang perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga di Kota Probolinggo periode tahun 1993-1999. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang perkembangan perusahaan daerah air minum sebagai perusahaan daerah pengelola fasilitas infrastruktur distribusi air bersih pada kurun waktu akhir orde lama tahun 1993 hingga awal reformasi tahun 1999 di Kota Probolinggo. Pembahasan ini pula lebih kepada perkembangan apa saja terjadi pada perusahaan daerah air minum Bayuangga Kota Probolinggo dari masa ke masa hingga perkembangan sistem penyediaan jaringan air bersih yang mengalami perubahan karena banyak faktor penentu seperti bertambahnya jumlah pelanggan hingga bertambahnya fasilitas pendukung dari jaringan air tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat di Kota Probolinggo.

**BAB IV:** bab ini membahas tentang dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan perusahaan daerah air minum yang mempengaruhi pengelolaan sistem penyediaan dan jaringan serta distribusi air bersih bagi kehidupan masyarakat di Kota Probolinggo.

**BAB V:** bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan disajikan secara ringkas seluruh penemuan dalam penelitian yang diperoleh melalui hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Untuk pembahasan dalam subbab saran, berisikan saran atau langkah yang perlu diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

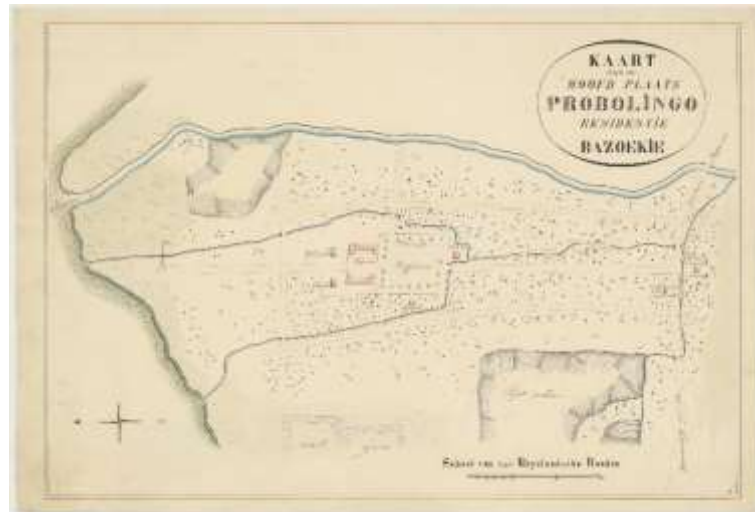




## BAB II

### GAMBARAN UMUM KAWASAN KOTA PROBOLINGGO

#### A. Sejarah Kota Probolinggo



Gambar 2.1 Peta Probolinggo antara tahun 1817-1855  
*Sumber:* Nationaal Archief, NL-HaNA\_4.VELH\_532.  
(Diakses 19 November 2025).

Pada tahun 1743 kawasan seluruh wilayah Timur Pasuruan menjadi hak pemerintahan VOC dalam sebuah perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram termasuk wilayah Banger (Probolinggo). Untuk mengukuhkan pengaruhnya di Banger VOC pada tahun 1746 mengangkat seorang Bupati pertama di Banger bernama Kyai Djojolelono dengan gelar Tumenggung dengan kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono sendiri merupakan Putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), seorang pemangku jabatan patihnya Bupati Pasuruan yaitu Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Pihak kompeni terkenal dengan politik *divide et impera*-nya (adu domba). Kyai Djojolelono dipengaruhi dan diadu domba agar menangkap serta mengeksekusi



Panembahan Semeru, Patih wilayah Tengger yang juga keturunan Untung Suropati yang dianggap ancaman oleh pihak kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono dengan strategi di jebak dalam undangan pertemuan. Setelah terbunuhnya Panembahan Semeru Kyai Djojolelono sadar bahwa dirinya dijemak dalam politik adu domba pihak kompeni dan memilih untuk mundur dari posisinya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768.<sup>22</sup>

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono pihak kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra dari Raden Tumenggung Tjondronegoro, seorang Bupati Surabaya ke-10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya di pindahkan ke Benteng Lama. Pada saat pemerintahan Tumenggung Djojonegoro terjadi kembali politik adu domba dengan tujuan untuk menangkap Kyai Djojolelono untuk dieksekusi. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pesarean Sentono.<sup>23</sup>

Pada masa pemerintahan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger menjadi lebih makmur, penduduk semakin bertambah banyak populasinya. Tumenggung Djojonegoro juga mendirikan Masjid Jami' pada tahun 1770. Lalu pada tahun tersebut pula wilayah Banger oleh Tumenggung Djojonegoro diubah menjadi Probolinggo yang memiliki arti wilayah yang bersinar yang berbentuk

---

<sup>22</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, "Sejarah Kota Probolinggo," dalam <https://dlh.probolinggokota.go.id/page/sejarah-kota>, 31/12/2025.

<sup>23</sup> Sekertaris Kota Probolinggo, "Sejarah Kota Probolinggo," dalam <https://bag-pemerintahan.probolinggokota.go.id/page/sejarah>, 31/12/2025.

tugu. Tumenggung Djojonegoro sendiri wafat dan dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami'.<sup>24</sup>

Probolinggo pada tahun 1890 pernah menjadi wilayah keresidenan yang terbagi menjadi 3 *afdeling* (daerah), diantaranya Probolinggo Banger dengan luas 834 km<sup>2</sup>, Kraksaan dengan luas 917,76 km<sup>2</sup> dan Lumajang dengan luas 1737 km<sup>2</sup>. Pada waktu itu memiliki batas wilayah sebelah Utara: Supitan Madura, Timur: Keresidenan Besuki, Selatan: Segara Hindi, dan Barat: Keresidenan Pasuruan.



Gambar 2.2 Peta Probolinggo tahun 1881

Sumber: Digital collections, Universiteit Leiden  
(Diakses 19 November 2025).

Pada zaman kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia, pertumbuhan pemerintahan daerah otonomi tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan pemerintah desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya pada tahun

---

<sup>24</sup> Pemerintah Kota Probolinggo, "Sejarah Kota Probolinggo," dalam <https://probolinggokota.go.id/profil/sejarah-kota-probolinggo> , 19/11/2025.

1905 dibentuklah dewan daerah otonomi kota yang disebut *Gemeente-raad*, sebagai perwujudan dari kebijakan *Desentrasatie wetgeving*.

Pada kurun waktu 1918 di seluruh tanah Jawa dibentuklah sembilan belas wilayah *Gemeente*. Penetapan menjadi wilayah *Gemeente* (otonomi khusus) untuk Probolinggo terutama dintajau dari letak wilayahnya yang strategis, karena dikelilingi oleh beberapa buah pabrik gula, perkebunan-perkebunan tembakau dan lain-lain. Selain itu wilayah Kota Probolinggo merupakan kota Pelabuhan yang cukup mampu untuk menampung dan mengeksport hasil-hasil dari Perkebunan-perkebunan tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan *staatsblad van nederlandsche indie* tahun 1918 No. 322, pada tanggal 1 Juli 1918 dibentuklah *Gemeente* Probolinggo dengan Dewan Perwakilannya terdiri dari delapan orang anggota bangsa Eropa, empat orang anggota dari Indonesia dan seorang anggota bangsa Asia.

Sejak tahun 1918 selama 10 tahun *Gemeente* Probolinggo hingga lima kali berturut-turut dipegang oleh seorang asisten residen, selaku ketua DPR karena tugas seorang asisten residen sebagai pegawai *Binnenlands Bestuur* (administrasi dalam negeri) sudah cukup berat, terpaksa hanya sebagian dari perhatiannya yang dapat dicurahkan untuk kepentingan daerah kota. Pada bulan Desember tahun 1928, diangkatlah seorang *Burgemeester* (walikota) sebagai kepala daerah dengan tenaga penuh.

---

<sup>25</sup> Tiyo Eka Mayshuroh., Abdus Sair. “Stratifikasi Sosial dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda”, dalam jurnal: *Journal of Urban Sociology*, Vol. 6 No. 1 (2023),2, di download melalui: (<https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/2799>).

Letak geografis Probolinggo di pantai Utara Jawa dinilai cukup strategis dan memiliki potensi sebagai *bufferstaat* (penyangga) dengan daerah *hinterland*-nya yang subur (wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember dan sekitarnya) semakin memperkuat pertimbangan pemerintah kolonial untuk menjadikan Probolinggo sebagai pusat ekonomi dan pusat produksi dan pengumpulan bagi hasil perkebunan gula, tembakau, kopi, karet dll. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu merancang dan menata bentuk dan berkembangnya kota Probolinggo agar sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan memunculkan jalan poros utama kota dari sebelah Utara hingga Selatan, yakni Jalan Suroyo sebagai *Heerenstraat*, menuju alun-alun sebagai pusat pemerintahan, berhubungan dengan tangsi atau benteng militer dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Tembaga.

Posisi jalan poros Suroyo tersebut letaknya berpotongan tegak lurus dengan *Groteposweb* (Jalan pos Sukarno-Hatta dan Panglima Sudirman) yang menjadi unsur penegas bahwa dimunculkannya kerangka utama bentuk kota Probolinggo yang akan menjadi daerah penting dan potensial, baik dalam arti ekonomi maupun strategis.

Pada masa pemerintahan kolonial di *Gemeente* Probolinggo, infrastruktur pada waktu itu bisa dikatakan lengkap, selain sebagai pusat pemerintahan, sekolah dan pabrik, pelabuhan, kota Probolinggo pada waktu itu juga sudah memiliki model transportasi angkut berupa kereta api (*staadspoorwegen*), trem (*Probolinggo Stroomtram Maatschappij*), perusahaan listrik swasta ANIEM (*Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij*), pompa bensin, kantor pos dan

telegram, gedung *societet* “Harmonie”, rumah ibadah, rumah sakit, menara air dan sebagainya.<sup>26</sup>

## **B. Letak Geografis**

### **1. Koordinat Geografis & Batas Wilayah**

#### **a. Koordinat**

Kota Probolinggo berada di antara  $7^{\circ} 43' 41''$  –  $7^{\circ} 49' 04''$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 10'$  –  $113^{\circ} 15'$  Bujur Timur Secara desimal, kira-kira pada  $-7,7543^{\circ}$  (LS) dan  $113,2159^{\circ}$  (BT).

#### **b. Luas Wilayah**

Mencakup sekitar  $56,67 \text{ km}^2$

#### **c. Batas Administratif**

Utara: Selat Madura

Timur, Selatan, dan Barat: Kabupaten Probolinggo

### **2. Konteks Geografis dan Topografi**

Kota Probolinggo terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di wilayah "Tapal Kuda", yaitu jalur strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Berjarak sekitar 100 km tenggara Surabaya

Secara topografi, wilayah Kota Probolinggo merupakan dataran rendah pesisir, dengan elevasi rata-rata rendah kisaran beberapa meter di atas permukaan laut Kabupaten Probolinggo di sekitarnya memiliki gradien naik ke arah

---

<sup>26</sup> Perencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kota Probolinggo, Probolinggo Tempo Dulu dan Kini, 23-25.

pegunungan seperti Semeru, Argopuro, dan Bromo, walaupun kota itu sendiri tetap berada di dataran rendah.

### **3. Rincian Administratif Internal**

Kota Probolinggo dibagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan:

- a. Kecamatan Mayangan memiliki 5 kelurahan, meliputi; Wiroborang, Jati, Mangunharjo, Mayangan, dan Sukabumi.
- b. Kecamatan Kademangan memiliki 6 kelurahan, meliputi; Kademangan, Ketapang, Pilang, Pohsangit Kidul, Triwung Kidul dan Triwung Lor.
- c. Kecamatan Wonoasih memiliki 6 kelurahan, meliputi; Jrebeng Kidul, Kedungasem, Kedunggaleng, Pakistaji, Sumber Taman dan Wonoasih.
- d. Kecamatan Kedopak memiliki 6 kelurahan, meliputi; Kedopak, Jrebeng Kulon, Jrebeng Wetan, Kareng Lor dan Sumber Wetan.
- e. Kecamatan Kanigaran memiliki 6 kelurahan, meliputi; Kanigaran, Curahgrinting, Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, Sukoharjo dan Tisnonegaran.

### **C. Demografi**

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan atas jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan kependudukan di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan cukup dinamis dengan pemerataan jumlah penduduk seiring



dengan keseimbangan pembangunan di wilayah utara dan wilayah selatan Kota Probolinggo.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi Penduduk Interim tahun 1993-1999, jumlah penduduk Kota Probolinggo pada tahun 1993 adalah 178.703 jiwa yang terdiri dari 87.512 orang laki-laki dan 91.191 orang perempuan. Angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,97. Hal tersebut berarti terdapat 96 orang laki-laki di setiap 100 orang perempuan di wilayah tersebut.<sup>27</sup>

Penduduk Kota Probolinggo kurun waktu 1993 terbagi ke dalam 3 kecamatan meliputi: Kademangan, Wonoasih dan Mayangan. Perbandingan jumlah penduduk antar setiap kecamatan pada tahun 1993 menurut jumlah penduduk kecamatan menurut dewasa dan anak-anak, tertinggi adalah Kecamatan Mayangan dengan 105.151 jiwa, lalu Kecamatan Kademangan dengan 38.788, dan jumlah terendah yaitu Kecamatan Wonoasih dengan 34.759 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Probolinggo terpusat di wilayah pusat kota bagian utara yang terhubung langsung dengan Pelabuhan dan dekat dengan pusat bisnis dibandingkan dengan di wilayah bagian selatan kota yang merupakan kawasan perbatasan yang masih bersifat agraris. Karenanya jumlah penduduk di setiap Kecamatan sangat bervariasi.<sup>28</sup> Untuk menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sebagai berikut.

---

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, "Kotamadya Probolinggo Dalam Angka 1993-1999", 29/12/2025.

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, "Kotamadya Probolinggo Dalam Angka 1993", 29/12/2025.



Tahun	Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
1993	87,512	91,191	178,703
1994	87,662	91,292	178,954
1995	87,843	91,379	179,222
1996	88,071	91,570	179,641
1997	88,299	91,780	180,079
1998	88,533	92,126	180,659
1999	88,678	92,415	181,093

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Probolinggo Periode 1993-1999.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo  
(Diakses 29 Desember 2025)

Selain dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan dari tahun 1993-1999. Kota Probolinggo juga dapat dilihat berdasarkan klasifikasi kelompok usia produktif dan non-produktif sebagaimana berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Produktif (Jiwa)	Jumlah Penduduk Usia Non-Produktif (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1993	110,210	68,493	178,703
1994	110,323	68,631	178,954
1995	110,497	68,725	179,222
1996	110,272	69,368	179,640

1997	119,621	60,458	180,079
1998	121,166	59,493	180,659
1999	123,106	57,987	181,093

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non-Produktif di Kota Probolinggo Periode 1993-1999.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

(Diakses 30 Desember 2025)

Berdasarkan tabel data yang disajikan, kita dapat mempelajari struktur demografi penduduk Kota Probolinggo selama periode 1993-1999. Data ini mencakup jumlah penduduk usia produktif (umumnya 15-64 tahun, yang dianggap sebagai kelompok yang mampu bekerja dan berkontribusi secara ekonomi) dan non-produktif (umumnya anak-anak 0-14 tahun dan lansia 65 tahun ke atas, yang bergantung pada kelompok produktif). Total penduduk diperoleh dari penjumlahan kedua kelompok tersebut. Dari data ini, beberapa analisis utama yang dapat dipelajari meliputi tren pertumbuhan penduduk, pergeseran komposisi usia, dan implikasi demografis. Total penduduk mengalami peningkatan secara bertahap dari 178.703 jiwa pada 1993 menjadi 181.093 jiwa pada 1999, dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 0.23% per tahun menunjukkan pertumbuhan populasi yang lambat dan terkendali. Kelompok usia produktif stabil di sekitar 110.000 jiwa selama 1993-1996, kemudian melonjak signifikan mulai 1997 (meningkat sekitar 8.5% dari tahun sebelumnya) dan terus naik hingga mencapai 123.106 jiwa pada 1999. Sebaliknya, kelompok non-produktif mengalami peningkatan kecil hingga 1996, lalu menurun tajam mulai 1997 (turun sekitar 13% dari 1996 ke 1997). Pergeseran ini mengindikasikan transisi demografi, di mana lebih banyak penduduk memasuki

usia produktif, mungkin akibat penurunan angka kelahiran sebelumnya atau migrasi masuk tenaga kerja.

Pada periode 1993-1996, angka beban ketergantungan relatif tinggi dan stabil di kisaran 62%, yang berarti setiap 100 orang usia produktif harus mendukung sekitar 62 orang non-produktif. Ini menunjukkan beban ketergantungan yang cukup berat, di mana sumber daya ekonomi lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan perawatan lansia, daripada investasi produktif. Namun, mulai 1997, angka beban ketergantungan mengalami penurunan drastis hingga mencapai 47.10% pada 1999. Penurunan ini mencerminkan perbaikan struktur demografi, di mana proporsi penduduk produktif meningkat secara signifikan (dari sekitar 61-62% menjadi 68% dari total penduduk), sementara proporsi non-produktif menurun (dari 38-39% menjadi 32%). Secara keseluruhan, tren ini positif karena mengurangi tekanan pada kelompok pekerja dan membuka peluang untuk akumulasi modal.

Kualitas penduduk dapat dinilai dari perspektif demografi, di mana proporsi usia produktif yang tinggi menandakan potensi sumber daya manusia yang lebih baik untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Berdasarkan data, kualitas penduduk Kota Probolinggo mengalami peningkatan selama periode ini. Pada 1993-1996, proporsi usia produktif sekitar 61-62% dari total penduduk, yang tergolong sedang—menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih bergantung pada kelompok pekerja yang relatif stabil tapi tidak berkembang. Mulai 1997, proporsi ini melonjak ke 66-68%, sementara non-produktif turun ke 32-34%. Ini mengindikasikan peningkatan kualitas penduduk karena adanya "bonus demografi"

(*demographic dividend*), di mana lebih banyak individu berada pada usia paling produktif, potensial untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan per kapita, dan keterampilan tenaga kerja. Namun, kualitas ini juga bergantung pada faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan (yang tidak tercakup dalam data ini), tapi secara demografis, pergeseran ini menunjukkan masyarakat yang semakin matang dan siap berkontribusi.

Pengaruh dan dampak terhadap pembangunan yang dapat dilihat dari data ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan Kota Probolinggo. Pada awal periode (1993-1996), angka beban ketergantungan yang tinggi berdampak pada alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor sosial seperti pendidikan dasar, kesehatan anak, dan bantuan lansia, yang dapat memperlambat investasi di infrastruktur atau industri. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, karena kelompok produktif memiliki daya tabung rendah akibat beban keluarga. Namun, penurunan angka beban ketergantungan mulai 1997 memberikan dampak positif: lebih banyak tenaga kerja tersedia untuk sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, atau manufaktur di Probolinggo (yang dikenal sebagai kota pelabuhan dan pertanian). Ini bisa mendorong peningkatan PDB lokal, penciptaan lapangan kerja, dan urbanisasi yang lebih baik. Secara relevan, transisi ini relevan dengan kebijakan pembangunan nasional era Orde Baru akhir, di mana fokus pada pengendalian keluarga berencana (KB) mulai menunjukkan hasil, mengurangi angka kelahiran dan memperbesar kelompok produktif—sehingga mendukung target pembangunan berkelanjutan seperti peningkatan akses pendidikan vokasi dan investasi modal.

Pengaruh dan dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Kota Probolinggo periode 1993-1999 untuk angka beban ketergantungan tergolong tinggi pada awal periode berdampak pada kerentanan sosial, dimana keluarga dengan banyak tanggungan non-produktif berisiko kemiskinan, malnutrisi, atau akses terbatas ke layanan kesehatan, yang dapat mengancam stabilitas masyarakat. Penurunan angka beban ketergantungan kemudian memberikan pengaruh positif, seperti peningkatan kesejahteraan rumah tangga karena lebih banyak anggota keluarga yang bisa bekerja, sehingga meningkatkan pendapatan dan ketahanan terhadap krisis (misalnya, dampak krisis moneter 1998 yang mungkin memengaruhi data). Dampak jangka panjang adalah masyarakat yang lebih mandiri, dengan potensi penurunan tingkat pengangguran muda jika dikelola baik. Relevansinya tinggi untuk keberlangsungan, periode ini menandai awal jendela peluang demografi, di mana jika pemerintah lokal berinvestasi di pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, masyarakat bisa mencapai keberlangsungan jangka panjang hindari "jebakan demografi" di mana bonus ini berubah menjadi beban jika tenaga kerja tidak terserap. Secara keseluruhan, data ini relevan untuk perencanaan kota, seperti program KB lanjutan atau pengembangan SDM, guna memastikan pembangunan inklusif dan keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi warga Probolinggo.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, "Kotamadya Probolinggo Dalam Angka 1993", 30/12/2025.

#### **D. Keadaan Sosial Ekonomi**

Kota Probolinggo merupakan daerah kecil yang berada di Timur pulau Jawa dan berbatasan langsung di sebelah Timur, Barat, dan Selatan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo lalu di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Madura. Meninjau dari beberapa keadaan sosial masyarakatnya wilayah Kota Probolinggo di dominasi oleh kultur masyarakat Jawa dan Madura yang beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat disana. Walaupun hal tersebut ada di lingkungan masyarakat Kota Probolinggo namun, makna toleransi dan berintegrasi tinggi terhadap persatuan yang ada. Kondisi sosial masyarakat di Kota Probolinggo tidak jauh beda dengan masyarakat pulau Jawa pada umumnya. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat Kota Probolinggo memanfaatkan keadaan geografis dan topografis serta tanah yang cenderung subur sehingga membentuk sebuah komoditas ekonomi di bidang agraris.

Tanaman yang dihasilkanpun beragam dari mulai kebutuhan pokok seperti tanaman jagung dan padi hingga tanaman sayur seperti bawang merah lalu tanaman buah ikonik seperti buah mangga dan buah anggur. Kota Probolinggo sendiri merupakan wilayah yang terkenal sebagai kota transit yang dahulunya pada zaman kolonial Belanda di fungsikan sebagai tempat transit dalam memasok kebutuhan ekspor maupun impor kebutuhan sehari-hari maupun bisnis pada waktu itu.<sup>30</sup> Mata pencarian penduduk kota bervariasi, seperti sebagai petani, pedagang, nelayan,

---

<sup>30</sup> Alvin Firdausyul Hidayat, "Relevansi Kebijakan Pemerintah No.69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium Terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2025), 33.



tenaga kasar, tukang, dan pegawai. Kedua kultur etnik di Kota Probolinggo yaitu Madura dan Jawa, mempunyai perbedaan dimana, kultur Jawa yang dikenal halus karena dibawa oleh kehidupan persawahan berbeda dengan kultur Madura yang sedikit kasar karena ekologi ladang. Percampuran etnik memang sering menjadi dan orang Madura terserap dalam kultur Jawa, khususnya kelompok masyarakat menengah dan atas, sedangkan kelompok bawah masih bertahan dalam isolasi kultur Madura sendiri. Orang-orang Jawa tetap menekuni pekerjaan sebagai petani dan orang Madura sebagai nelayan, pedagang dan buruh.

Pada umumnya penduduk Kota Probolinggo menggunakan bahasa Jawa dan Madura, tergantung siap yang diajak komunikasi. Penduduk dapat berbahasa Jawa ngoko (kasar), tetapi juga krama (halus). Kedua Bahasa Jawa tersebut diucapkan dengan logat Madura. Penggunaan bahasa tergantung keperluan misalnya di kantor-kantor biasanya digunakan bahasa Jawa krama. Di daerah Mayangan tempat yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat berkultur Madura tinggal sebagai pekerja kasar dan tetap menggunakan dua bahasa yang berbeda. Bahkan ada kecenderungan, anak-anak muda di daerah Kota Probolinggo lebih suka menggunakan bahasa Jawa dialek pesisiran dengan logat Madura. Hal ini disebabkan kebanyakan anak-anak muda di kawasan Kota Probolinggo merupakan generasi kedua atau ketiga berbeda dengan orang tua dan kakek nenek mereka, datang langsung dari pulau Madura sehingga masih tampak kental kultur dari tempat asalnya. Tanaman ketela menjadi hasil penting selain komoditas padi. Makanan pokok masyarakat Kota Probolinggo berupa beras. Area pertanian di Kota Probolinggo membentang di bagian timur kota sebelah utara sepanjang pantai dan



beberapa di kawasan bagian barat dan selatan. Tanah-tanah di sepanjang pantai lebih banyak difungsikan sebagai tambak dengan komoditas misalnya saja ikan bandeng baik di pasarkan dalam bentuk ikan segar ataupun ikan yang sudah di pindang dan tidak pernah diolah menjadi ikan asin. Harga komoditas ikan bandeng juga jauh lebih mahal dibandingkan harga ikan tambak pada umumnya.

Kawasan Kota Probolinggo juga memiliki klasifikasi atau penggolongan kelompok petani berdasarkan kepemilikan tanah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya latarbelakang budaya feodalisme dari zaman masa kerajaan Mataram yang mengakar pada kultur masyarakat Kota Probolinggo. Pada masa kolonial sendiri hak atas kepemilikan tanah mempunyai implikasi pada hak dan kewajiban terhadap desa. Menurut Domis, Residen Pasuruan tempo dulu, stratifikasi petani di Probolinggo di dasarkan pada keinginan bekerja pada penguasa dan kerja wajib setiap tahunnya. Dalam hal ini terdapat sebuah kesalahan dimana bekerja untuk pihak penguasa dan kerja wajib merupakan konsekuensi dalam kepemilikan tanah dan bukan termasuk ke dalam stratifikasi petani. Dalam kehidupan pertanian di kawasan Kota Probolinggo di kenal dengan adanya sebuah konsep hubungan kawula-gusti yang dimana hal tersebut mengatur hubungan antara penguasa dengan warga desa. Berdasarkan pada sistem yang ada pada kepemilikan tanah petani dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, antara lain: (1) *wong kenceng* (bahasa Madura: *oreng kenceng*) ialah warga desa inti yang telah mendapat bagian tanah milik desa atau tanah komunal; (2) *wong kendo* (*oreng kendo*) ialah yang memiliki pekarangan dan rumah serta masih termasuk dalam daftar warga desa yang pada suatu saat (kalau ada lowongan) akan menjadi golongan penerima tanah desa; (3)

*tumpang* (istilah lain *indung*) adalah yang hanya memiliki rumah, menumpang di halaman atau pekarangan orang lain; (4) *tumpang tlosor* adalah petani yang sama sekali tidak memiliki rumah dan tinggal ataupun menumpang di rumah orang lain. Terdapat perbedaan istilah untuk beberapa daerah, walaupun esensinya sama. Seperti istilah *wong konceng* di tempat lain disebut juga *kuli kenceng*, *kuli ngarep*, *kuli kuwat*, *kuli gogol*, dan *sikep*. *Wong kendo* disebut juga dengan *kuli kendo*, *kuli mburi*, dan *kuli setengah kenceng*. Dalam hirarki status, keempat golongan dapat dibedakan sebagai golongan petani pemilik (*wong kenceng* dan *wong kendo*), golongan petani penyewa (*tumpang*) dan buruh tani atau pekerja upahan (*tumpang tlosor*).

Stratifikasi sosial juga didasarkan pada lamanya bermukim. Status tertinggi diberikan kepada keturunan pendiri-pendiri desa. Pendiri desa biasanya adalah pembuka-pembuka tanah, sehingga sekaligus menyandang sebagai pemilik tanah. Asal tidak dipindahtangankan, keturunan pendiri desa mempunyai status sama, yaitu pemilik tanah. Dalam diri keturunan pendiri desa kriteria kepemilikan tanah dan lamanya bermukim. Selain di bidang pertanian, masyarakat Kota Probolinggo juga menekuni usaha di bidang perdagangan sebagian besar ditangani golongan etnis lain, terutama Cina. Sedangkan untuk masyarakat lokal lebih untuk memilih untuk menjadi pedagang kecil, ataupun sebagai penjual barang keliling. Masyarakat lokal mempunyai kesan negatif terhadap orang beretnis Cina. Hal tersebut disebabkan oleh peristiwa tempo dulu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 karena mengeksploitasi penduduk lokal melalui desa-desa yang disewa. Orang-orang Cina sendiri menguasai beberapa bidang penting di bagian ekono baik

sebagai pedagang menengah dan kecil. Lebih dari satu abad, sejak berakhirnya kekuasaan pihak kompeni di Kota Probolinggo pada tahun 1799, orang-orang Cina bergerak di bidang ekspor dan impor, pemilik toko, pabrik roti, pemungut pajak, dan rentenir, di samping meminjamkan uang dengan bunga tinggi, mereka juga menyewakan tanah kepada penduduk lokal. Orang-orang Cina di Kota Probolinggo juga memiliki sistem tersendiri dalam membeli tanaman dari petani lokal yaitu dengan sistem *ngijo*, dimana pembelian tanaman petani dilakukan ketika masih dalam keadaan muda (tanaman padi yang masih hijau) atau belum siap panen. Biasanya petani menjual tanamannya dengan sistem *ngijo* karena terdesak oleh kebutuhan. Oleh karena itu, dibeli dengan harga rendah dibandingkan tanamannya yang sudah siap panen. Orang Cina juga seringkali meminjamkan uang kepada pedagang-pedagang kecil sekitar di desa-desa.

Di kalangan pedagang, perbedaan status sosial lebih banyak didasarkan pada penguasaan modal. Oleh karena itu, dikenal pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar di kalangan penduduk dikenal dengan sebutan saudagar. Dengan demikian golongan saudagar dalam hirarki sosial menempati posisi atas, karenanya memiliki status sosial tinggi di masyarakat.

Pasar di Kota Probolinggo juga banyak menawarkan komoditas dari hasil ikan laut, ikan tawar tambak, garam, dan sarang burung. Juga hasil tanaman ekspor, seperti jagung, kacang, tembakau, dan minyak jarak. Komoditas barang impor juga ditawarkan disana seperti halnya; rotan, karung, gula Jawa, minyak kelapa, kain Madura, maupun besi batangan. Terdapat empat buah pasar di kota yang sibuk dan ramai pengunjung. Kesibukan pasar ditunjang adanya prasarana jalan yang baik.

Jalan-jalan yang cukup baik memungkinkan penduduk sekitar kota dapat berbelanja di kota dan hasil bumi dari pedalaman dapat dipasarkan ke kota.

Di kota terdapat dua buah pabrik gula, yaitu Wonoasih dan Umbul. Masing-masing pabrik tersebut mempunyai kawasan perkebunan tersendiri. Akan tetapi, tidak jarang pabrik gula menyewa tanah penduduk untuk ditanami tebu. Petani yang tanahnya disewa dapat bekerja sebagai buruh di perkebunan tebu dengan upah harian. Tanah yang disewa, biasanya sawah, dipilih yang dekat dengan desadesa yang padat penduduknya, dengan harapan mudah memperoleh tenaga kerja. Meskipun telah merekrut tenaga kerja dari petani dan buruh tani, perkebunan masih kekurangan tenaga kerja dan untuk mencukupinya direkrut tenaga kerja upahan lain. Terciptalah kelompok sosial lain, yakni buruh. Dalam kelompok ini juga dapat dimasukkan pekerja kasar lainnya, seperti kuli pelabuhan. Banyak buruh perkebunan dan pelabuhan berasal dari etnik Madura. Kelompok pekerja kasar pelabuhan banyak mendiami pemukiman padat di daerah Mayangan.

Pada akhir pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Probolinggo dibagi menjadi tiga distrik, yaitu Probolinggo (kota), Tongas, dan Sukapura. Distrik Probolinggo dibagi lagi ke dalam lima onderdistrik, yaitu Probolinggo, Kanigaran, Wonoasih, Bantaran, dan Leces. Setiap distrik dikepalai seorang wedana dan setiap onderdistrik dikepalai seorang asisten wedana. Bupati dibantu oleh seorang patih, yang membantu menjalankan tugas administrasi dan mewakili bupati bila berhalangan. Dari bupati hingga sistem wedana merupakan hirarki pejabat pemerintahan pribumi yang mendapat gaji dari pemerintah dan kedudukannya sebagai pegawai pemerintah dalam negeri. Masih terdapat para pejabat bawahan

atau pegawai negeri biasa yang jumlahnya justru cukup besar. Kelompok pegawai ini banyak bekerja di dinas-dinas pemerintah, juga sebagai guru. Kelompok yang sering disebut sebagai priyayi rendahan ini hidup dalam bayang-bayang priyayi menengah dan tinggi, yaitu wedana, patih, dan bupati. Penguasa Jepang mempertahankan sebagian besar dari mereka untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan terbentuknya golongan berpendidikan pegawai kantor, terjadilah metamorfosa sosial kaum ningrat feodal menjadi kaum menengah kota. Para pegawai, baik tinggi ataupun rendah, merupakan cadangan utama untuk mengisi posis-posisi kosong setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.<sup>31</sup>




---

<sup>31</sup> Ari Sapto “Kota Probolinggo Pada Masa Menjelang dan Awal Revolusi”, dalam jurnal: *Literasi*, Vol. 2 No. 1 (2022), 43-46, di download melalui (<https://junej.jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/6076>).

### **BAB III**

## **PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAWASAN KOTA PROBOLINGGO**

#### **A. Masa Orde Baru**



Gambar 3.1 Kunjungan Menteri Ke Sumber Air Ronggojalu  
(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya), 23 Juli 2025.

Pasca kemerdekaan pada tahun 1945 Sistem penyediaan air minum di Kota Probolinggo mulai mengalami transisi pengelolaan dimana sebelumnya masih menjadi hak kelola pemerintah kolonial Belanda bertransisi ke tangan pemerintah Indonesia. Pada tahun-tahun awal pasca kemerdekaan Indonesia sistem penyediaan air minum belum mengalami banyak perkembangan dan masih menggunakan saluran air dari peninggalan perusahaan zaman kolonial Belanda yaitu SAM. Namun, pada tahun 1949 dua mesin penggerak pompa air mengalami pembaharuan dengan kekuatan tenaga yang lebih tinggi yakni 27 PK dari yang sebelumnya hanya berkekuatan 20 PK. Kemudian pada tahun 1954 penambahan mesin baru untuk kebutuhan operasional kembali dilakukan dengan kapasitas 35 PK.

Melihat perkembangan perusahaan yang semakin pesat, maka SAM mengubah statusnya menjadi BPAM (Badan Pengelolaan Air Minum) pada tahun 1974. Hal tersebut bertujuan agar SAM nantinya dapat menjadi Perusahaan Daerah.



Berikutnya pada 3 November 1975 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975, PDAM Kota Probolinggo resmi dibentuk.<sup>32</sup>

Selanjutnya dengan meningkatnya jumlah konsumen pada tahun 1978 semua peralatan baik mesin maupun pipa-pipa utama ditambah dan sekaligus membuka jalur-jalur baru ke seluruh pelosok jaringan kota. Seiring berjalannya waktu penduduk Kota Probolinggo juga mengalami perkembangan jumlah penduduk yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah konsumen sejak tahun 1993, hal tersebut membuat menara air Randu Pangger Kota Probolinggo ini, tidak lagi berfungsi sebagai pusat penampungan air untuk suplai masyarakat dikarenakan kapasitas tangki menara sudah tidak mencukupi.<sup>33</sup>

JUMLAH LANGGANAN AIR MINUM MENURUT JENIS PEMAKAI DAN BESARNYA VOLUME YANG DIGUNAKAN TH.1976 dan TH.1977.

Tabel: 6.7.

89.

No.	Jenis pemakai	Th.1976		Th.1977	
		Jumlah langganan	Besarnya volume air yang digunakan(m-3)	Jumlah langganan	Besarnya volume air yang digunakan(m-3)
1.	Perusahaan dan Toko.	111	20.634	119	19.032
2.	Jawatan-2	90	42.336	95	39.792
3.	Rumah Tangga	973	177.276	996	244.296
4.	Mesjid dan Gereja	6	992	5	264
5.	Lain-lain.	52	2.476	75	1.104
Jumlah:		1.232	243.714	1.290	304.488

Sumber Data: Bag.Saluran Air Minum Pemd.

Gambar 3.2 Arsip Jumlah Langganan Air Minum Menurut Jenis Pemakai dan Besarnya Volume yang Digunakan Periode 1976-1977.  
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo), 30 Desember 2025.

<sup>32</sup> Bapak Suyanto, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 3 Juni 2025.

<sup>33</sup> Bapak Suyanto, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 3 Juni 2025.



PDAM Bayuangga pada awal tahun 1993 sebagai perusahaan daerah yang mengambil alih pengelolaan air minum dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Pada tahap awal ini, PDAM menghadapi tantangan besar terkait legitimasi institusional dan kapasitas teknis. Struktur organisasi yang diadopsi masih sederhana, terdiri atas: Direktur Utama, Sekretaris, Bagian Keuangan, Bagian Teknik, dan Bagian Pemasaran. Jumlah karyawan tidak lebih dari 30 orang, dan infrastruktur distribusi hanya mencakup wilayah pusat kota. Kapasitas produksi air pada 1993 tercatat sebesar 180 liter per detik, berasal dari dua sumber utama: Mata Air Sumberwringin dan sistem sumur bor di Kecamatan Mayangan. Jumlah pelanggan tercatat sebanyak 9.500 sambungan, dengan 70% berada di sektor rumah tangga. Pendapatan tahunan sebesar Rp 1,4 miliar, sedangkan biaya operasional mencapai Rp 1,1 miliar, menghasilkan surplus operasional sebesar Rp 300 juta.<sup>34</sup>

Periode ini ditandai oleh ekspansi signifikan dalam jaringan distribusi dan peningkatan jumlah pelanggan. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bu Wuryaningsih, SH. (1992–1996), PDAM Bayuangga mulai mengadopsi pendekatan yang lebih profesional dalam manajemen operasional. Struktur organisasi diperluas dengan penambahan Unit Pengawasan Intern dan Subbagian Humas, guna meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Arsip PDAM Bayuangga, *Laporan Pendirian PDAM Bayuangga*, 1993. 14 Mei 2025.

<sup>35</sup> Bapak Hadi Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Kota Probolinggo, 12 Maret 2025.



Gambar 3.3 Bu Wuryaningsih, SH. Periode tahun ( 1992-1996 )  
(Sumber: Dokumen peneliti), 13 Agustus 2025.

Pada tahun 1995, kapasitas produksi meningkat menjadi 245 liter per detik berkat penambahan fasilitas pengolahan di Mata Air Tlogosari. Jumlah pelanggan naik hingga 15.000 sambungan, dan pendapatan mencapai Rp 2,7 miliar di tahun 1996. Efisiensi operasional meningkat, dengan rasio *operational cost/revenue* turun dari 79% (1993) menjadi 67% (1996). Ekspansi jaringan menjangkau wilayah perifer seperti Kecamatan Kademangan dan Wonoasih, yang sebelumnya tidak terlayani air PDAM.<sup>36</sup>

Pada masa kepemimpinan dari Bu Wuryaningsih PDAM Kota Probolinggo tidak mengalami adanya perubahan pada kebijakan dalam hal pengelolaan dan operasional dalam pelayanan. Namun pada sekitar tahun 1993 untuk fasilitas dan infrastruktur PDAM masih bisa dikategorikan kurang memadai. Untuk jumlah karyawan kantor dan di lapangan pada waktu itu tidak mengalami kendala. Bu Wuryaningsih sendiri merupakan Direktur Utama PDAM Kota Probolinggo yang

---

<sup>36</sup> Arsip PDAM Bayuangga, *Laporan Tahunan 1996*. 14 Mei 2025.

memiliki latarbelakang sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai pengelola ekonomi pemerintah kota.

Pada kurun waktu 1992 hingga tahun 1996 hak dan kewajiban dari para staf karyawan terjamin dengan baik misalnya saja dengan adanya kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan berupa bonus setiap bulan yang diberikan namun tetap dibawah gaji pokok pada waktu itu. Pada masa ini PDAM Kota Probolinggo juga belum memiliki alat deketektor pipa dan alat pengukur kecepatan laju arus air distribusi. Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan dari seorang pensiunan Staf Teknik dan distribusi Bapak Supari yang menjelaskan terkait kendala kerusakan pada fasilitas distribusi yang melewati wilayah Desa Sumber Bulu dimana terjadi kerusakan yang memakan waktu reparasi sekitar 3 hari kerja hingga waktu malam hari.

Setelah tahun 1996 Bu Wuryaningsih digantikan posisinya oleh Bapak Drs. H. Johny Haryanto seorang Direktur Utama PDAM Kota Probolinggo yang memiliki latarbelakang sebagai seorang penanggung jawab pada pemerintah Kota Probolinggo. Pada masa kepemimpinan beliau PDAM Kota Probolinggo berada dibawah langsung pengelolaan pemerintah Kota dalam beberapa urusan terkait pengelolaan dan pelayanan pada PDAM. Pada masa kepemimpinan dari Bapak Johny mengalami perkembangan yang cukup stabil dimana karena kinerja beliau beberapa kebijakan terkait pengadaan barang di pantau langsung dan mengalami

penekanan pada pembelian untuk mengurangi anggaran belanja PDAM yang tidak diperlukan.<sup>37</sup>



Gambar 3.4 Bapak Drs. H. Johnny Haryanto Periode tahun ( 1996-2001 )  
(Sumber: Dokumen peneliti), 13 Agustus 2025.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 memberikan pukulan berat terhadap operasional PDAM Bayuangga. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok lebih dari 200%, sehingga biaya impor mesin, pipa, dan bahan kimia pengolahan air meningkat tajam. Anggaran belanja modal yang semula dialokasikan untuk ekspansi jaringan terpaksa dialihkan untuk menutup defisit operasional.<sup>38</sup>

Pada tahun 1998, PDAM mencatat kerugian operasional pertama sejak berdiri, yang berlangsung selama dua tahun berturut-turut. Tantangan finansial ini diperparah oleh kenaikan upah minimum regional pasca-Reformasi, serta peningkatan permintaan layanan dari masyarakat yang beralih dari sumur gali ke sumber air bersertifikat pasca-krisis air tanah yang tercemar.

<sup>37</sup> Bapak Supari, diwawancarai oleh penulis, Kota Probolinggo, 10 November 2025.

<sup>38</sup> Bambang Setiono, *Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Infrastruktur Daerah*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 89–94.



Gambar 3.5 Bagian sambungan pipa tahun 1978 yang sudah tidak berfungsi  
(Sumber: Dokumen peneliti), 23 Mei 2025.

## B. Masa Awal Reformasi

Awal masa reformasi setelah jatuhnya orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan masa perkembangan infrastruktur pada sistem penyediaan air minum di Kota Probolinggo. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh tidak beroperasinya lagi menara air di Randu Pangger yang pada tahun 1993. Pada waktu itu saluran air bersih di pompa dari sumber air Ronggojalu menuju menara air masih menggunakan mesin bertenaga listrik baru di salurkan ke masyarakat sekitar dengan memanfaatkan tekanan dari daya gravitasi. Hal tersebut dinilai masih kurang efisien terutama disaat wilayah Probolinggo dan sekitarnya mengalami pemadaman arus listrik yang membuat proses penyaluran air bersih juga terganggu. Oleh sebab itu pihak pengelola PDAM Kota Probolinggo menambah mesin penyalur air bertenaga diesel sebagai alternatif tambahan dalam menyelesaikan permasalahan di waktu pemadaman arus listrik. Menara air kota Probolinggo juga digantikan dengan sistem penyediaan air minum yang lebih efisien dan efektif karena langsung di salurkan dari rumah produksi pusatnya di Ranu Ronggojalu lalu ditampung di *Ground Reservoir* (tandon bawah) di unit

rumah pompa yang berada di Kota Probolinggo langsung didistribusikan ke konsumen menggunakan pompa sebagai booster.

Selain perkembangan yang telah disebutkan diatas kualitas air di rumah produksi Ronggojalu juga mengalami perkembangan dimana terjadi perubahan kualitas air yang disebabkan oleh adanya pergantian cairan ataupun senyawa yang digunakan untuk memfilter kebersihan dan kelayakan air yang akan di distribusikan ke masyarakat.<sup>39</sup>

Pada awalnya proses filter menggunakan kaporit yang berbentuk bubuk atau padat dan memiliki bau yang khas lalu digantikan dengan penggunaan gas clorin yang lebih tidak berbau dibandingkan penggunaan kaporit pada awalnya. Kedua bahan filter diatas bertujuan untuk membunuh bakteri yang ada di air pada saat proses pengolahan air di rumah produksi Ronggojalu. Bahan filter tersebut juga tidak mencemari dan merubah warna air yang menyebabkan peningkatan dalam kualitas air produksi PDAM sebelum di distribusikan ke masyarakat.<sup>40</sup>

Pasca-Krisis dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi pemerintahan daerah, PDAM Bayuangga melakukan restrukturisasi internal pada awal 1999. Struktur organisasi direvisi berdasarkan Peraturan Daerah No. 8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM, yang memperkenalkan sistem divisi fungsional (komersial, teknik, keuangan, SDM) dan memperkuat peran Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawas independen.<sup>41</sup> Langkah strategis utama tahun 1999

---

<sup>39</sup> Bapak Tono dan Bapak Yudi, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 8 November 2025.

<sup>40</sup> Bapak Windis, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 8 November 2025.

<sup>41</sup> Pemerintah Kota Probolinggo, *Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM Bayuangga*.



adalah delegasi otoritas teknis kepada tenaga ahli muda lulusan politeknik air, serta kerja sama dengan USAID melalui program *Urban Water and Sanitation Reform Initiative*, yang membantu dalam pelatihan SDM dan audit sistem distribusi.<sup>42</sup>

Kapasitas produksi pulih menjadi 260 liter per detik, dan jumlah pelanggan meningkat menjadi 17.500 sambungan. Pendapatan naik menjadi Rp 2,9 miliar, dan meskipun masih belum mencapai titik impas, tren keuangan menunjukkan pemulihan. Rasio biaya/pendapatan turun menjadi 95%, menandai awal pemulihan operasional.<sup>43</sup>



---

<sup>42</sup> USAID, *Annual Report: Urban Water and Sanitation Reform Initiative – East Java*, 2000, hlm. 34.

<sup>43</sup> Arsip PDAM Bayuangga, *Laporan Tahunan 1999*.



## **BAB IV**

### **DAMPAK PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO**

#### **A. Masa Akhir Orde Baru**

Pada masa orde baru, kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada modernisasi ekonomi dan infrastruktur publik termasuk di dalamnya sistem penyediaan air bersih melalui pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bayuangga Kota Probolinggo. PDAM sendiri berperan penting dalam mendukung program pemerintah pusat, terutama dalam konteks inpres air bersih dan Program Pembangunan Lima Tahun (Repelita V dan VI) yang dijalankan antara tahun 1989 hingga 1998.<sup>44</sup>

Pada awal tahun 1993, PDAM mengelola jaringan distribusi yang mencakup lima kecamatan utama, yaitu: Wonoasih, Mayangan, kedopok, Kanigaran, dan Kademangan, dengan fokus pada perluasan pipa transmisi dari sumber Ronggojalu. Kapasitas produksi meningkat secara bertahap dari sekitar 200 liter/detik pada tahun 1993 menjadi 390 liter/detik pada tahun 1998, di dukung oleh pendanaan dari anggaran daerah dan bantuan pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.<sup>45</sup>

Pada tahun 1994, sejalan dengan Pelita VI, PDAM melakukan modernisasi sistem pengolahan air, termasuk pemasangan unit desinfeksi dan reservoir baru di

---

<sup>44</sup> Booth, A. "Repelita V and Indonesia's Medium Term Economic Strategy", dalam jurnal: *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 3 No. 30. (1989), 25, di download melalui: <https://doi.org/10.1080/00074918912331335549>.

<sup>45</sup> Mulyadi Sumarto et al. "Insecurity and Historical Legacies in Welfare Regime Change in Southeast Asia – Insights from Indonesia, Malaysia, and Thailand", *Social Policy and Society*, 19 (2020): 629 – 643, di download melalui: <https://doi.org/10.1017/s1474746420000299>.

IPA Ronggojalu, yang meningkatkan kualitas air baku dari 3.000 liter/detik debit sumber alami. Perubahan sistem organisasi secara nasional pada awal tahun 1990-an dari awalnya yang berbasis sektoral ke wilayah mendorong PDAM Kota Probolinggo untuk membentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) sementara sebagai embrio restrukturisasi, meskipun transisi penuh baru terealisasi pasca tahun 1998. Pada sekitar tahun 1996-1997, program KPS mulai dieksplorasi, meskipun belum terealisasi sepenuhnya di Kota Probolinggo karena kendala tarif dan koordinasi dengan pemerintah daerah; contoh serupa di Pasuruhan (Umbulan) menunjukkan potensi model ini.<sup>46</sup>

Puncak perkembangan terjadi pada sekitar tahun 1998, tepatnya sebelum krisis moneter Asia meledak. PDAM berhasil menambah sambungan rumah baru sebanyak 15-20% dari total 19.938 sambungan (data retrospektif 2019 menunjukkan cakupan 59,62% yang berakar pada ekspansi akhir orde baru). Namun, setelah krisis tahun 1998 menghantam, menyebabkan beban utang pendanaan investasi sebelumnya dan penurunan pendapatan dari tarif air, membuat banyak PDAM skala nasional termasuk PDAM Kota Probolinggo kesulitan dalam hal likuiditas.<sup>47</sup>

Periode tahun 1993 hingga 1998 merupakan masa transisi penting bagi PDAM Kota Probolinggo karena terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan

---

<sup>46</sup> Emma Colven. "Thinking beyond success and failure: Dutch water expertise and friction in postcolonial Jakarta", *Environment and Planning C: Politics and Space*, 38 (2020): 961 - 979., di download melalui: <https://doi.org/10.1177/2399654420911947>.

<sup>47</sup> Bart Verheijen and I. N. Darma Putra. "Balinese cultural identity and global tourism: the Garuda Wisnu Kencana Cultural Park". *Asian Ethnicity*, 21 (2020): 425 – 442, di download melalui: <https://doi.org/10.1080/14631369.2019.1641691>.

pelayanan air bersih, di dorong oleh Kebijakan pemerintah daerah yang menyesuaikan arah Pembangunan nasional. Berdasarkan dokumen arsip Bappeda dan Kementerian Pekerjaan Umum, kapasitas produksi air bersih PDAM meningkat lebih dari 35% akibat proyek revitalisasi jaringan pipa dan sumur bor baru yang didanai dari pinjaman daerah serta bantuan program pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.<sup>48</sup>

Peningkatan tersebut berdampak langsung terhadap pola kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kota Probolinggo. Akses air bersih yang lebih baik menurunkan ketergantungan terhadap sumber air tradisional seperti sumur gali dan Sungai yang sebelumnya mendominasi pemakaian rumah tangga. Selain itu kualitas kesehatan masyarakat meningkat terlihat dari penurunan kasus penyakit berbasis air seperti diare dan disentri, di wilayah Kecamatan Mayangan dan Kanigaran (Dinas Kesehatan Probolinggo, Laporan 1998).<sup>49</sup> Namun, perkembangan PDAM juga menghadapi tantangan struktural dan administratif. Pada akhir masa orde baru, muncul tekanan inflasi, kenaikan biaya operasional dan keterbatasan investasi akibat krisis moneter 1997-1998. Kondisi ini memaksa PDAM menyesuaikan tarif dan menunda beberapa proyek perluasan layanan. Berikut beberapa Kebijakan yang mendasari dan mempengaruhi perkembangan PDAM pada masa itu.

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang kebijakan operasional PDAM daerah, termasuk penetapan tarif dan ekspansi. Di bawah

---

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya. (1995). *Laporan Tahunan Pengembangan Air Bersih Nasional 1993–1995*. Jakarta: Kementerian PU.

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, “Kotamadya Probolinggo Dalam Angka 1998”, 30/12/2025.

Wali Kota Soeprapto, diperkuat dengan anggaran daerah 1993-1998 yang berdampak terhadap integrasi dengan program KB dan sanitasi demi meningkatkan kesehatan Masyarakat.<sup>50</sup>

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, menjadi dasar hukum yang menjelaskan bahwa PDAM harus memiliki fungsi ganda sebagai fasilitas pelayanan publik (menyediakan air bersih dengan harga terjangkau) dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>51</sup>
3. Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 1990 tentang peningkatan penyediaan air bersih, menjadi dasar program pengembangan jaringan air minum seluruh wilayah administratif kabupaten maupun kota. Serta mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD untuk PDAM.<sup>52</sup>
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1992 tentang pe yang rusahaan daerah, peraturan yang mengatur status hukum PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berorientasi pelayanan publik, bukan berdasarkan pada keuntungan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Pemerintah Kota Probolinggo (1975). Mengatur tentang kebijakan daerah yang mengatur operasional PDAM.

<sup>51</sup> Republik Indonesia. (1984). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

<sup>52</sup> Republik Indonesia. (1990). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyediaan Air Bersih.

<sup>53</sup> Republik Indonesia. (1992). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah.

5. Program Pembangunan Jangka Menengah (Repelita V-VI, 1989-1998), menetapkan sektor air bersih sebagai prioritas infrastruktur untuk mendukung urbanisasi dan industrialisasi daerah.
6. Kebijakan Deregulasi dan Debirokrasi Daerah (1993-1997), memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama mengenai pendanaan dengan pihak swasta dan lembaga donor.
7. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan, menjadi landasan hukum utama pengelolaan sumber daya air di Indonesia, termasuk dalam konteks penyediaan air minum.<sup>54</sup>
8. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan umum, Kebijakan ini memfasilitasi akuisisi lahan untuk perluasan jaringan PDAM, termasuk pipa transmisi di Probolinggo. Dampak dari kebijakan ini adalah mempercepat infrastruktur, tetapi memicu konflik lahan kecil di pinggiran kota, mempengaruhi 10-15% rumah tangga miskin yang kehilangan akses sementara.<sup>55</sup>

Kebijakan Repelita pada kurun waktu 1993 hingga 1998 memiliki dampak positif bagi kesehatan dan penunjang kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo waktu itu, hal ini juga berdampak baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada masa ini pemerintah daerah lewat PDAM berupaya menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terlayani, terutama di kecamatan-

---

<sup>54</sup> Republik Indonesia. (1974). Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan, menjadi landasan hukum utama pengelolaan sumber daya air.

<sup>55</sup> Republik Indonesia. (1993). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan umum.

kecamatan padat penduduk seperti daerah Kademangan, Kedopak, Wonoasih, dan Kanigaran.

Kebijakan sentral yang mendorong perkembangan PDAM adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang memberi landasan legal pendirian dan pengelolaan perusahaan milik daerah.<sup>56</sup> Selain itu, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (Repelita) memberi fokus anggaran dan peningkatan sarana prasarana PDAM. Pemerintah pusat dan daerah mengatur berbagai regulasi yang mewajibkan penyediaan air minum dari instansi resmi untuk meningkatkan pelayanan dengan standar kesehatan serta aksesibilitas. Pada masa ini, program pembangunan menitikberatkan aspek teknis dan investasi untuk meningkatkan kapasitas distribusi, jaringan perpipaan, serta pengelolaan yang lebih profesional.

#### **B. Masa Awal Reformasi**

Pada tahun 1999 merupakan awal kebangkitan serta pemulihan bagi PDAM Kota Probolinggo, dimana pada waktu itu krisis moneter memperburuk kondisi pendanaan untuk urusan operasional. Pada awal tahun 1999 kapasitas produksi turun menjadi sekitar 250-300 liter/detik akibat problematika pemeliharaan yang terhambat oleh inflasi bahan baku impor (seperti pompa dan desinfektan). Jaringan pipa transmisi dari sumber mata air Ronggojalu mengalami kebocoran hingga 30% karena kurangnya perawatan pra-krisis, menyebabkan pemadaman air di kecamatan pusat seperti Mayangan dan Kanigaraan. Laporan retrospektif menunjukkan jumlah

---

<sup>56</sup> Republik Indonesia. (1962). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang memberi landasan legal pendirian dan pengelolaan perusahaan milik daerah.



sambungan rumah baru hanya bertumbuh sekitar 5-7% dari total 18.000-19.000 sambungan, jauh di bawah target Pelita VI (1994-1998) yang terbawa ke masa reformasi.<sup>57</sup>

Pada pertengahan tahun 1999, di bawah arahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PDAM memulai program “Penyehatan PDAM” berskala nasional, yang diimplementasikan local melalui bantuan dari IMF senilai Rp. 50-100 miliar untuk rehabilitasi infrastruktur. Hal ini mencakup perbaikan reservoir di Ronggojalu dan pemasangan meteran digital untuk efisiensi. Transisi ke otonomi daerah mendorong Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) sementara sebagai jembatan menuju restrukturisasi, meskipun penuh tantangan karena keterlambatan alokasi DAU (Danan Alokasi Umum). Hingga akhir tahun 1999, dengan cakupan layanan yang hanya naik tipis menjadi 45-50% dari populasi, tetapi kualitas air menurun akibat kontaminasi sementara dari banjir musiman yang diperburuk pasca krisis moneter 1998.

Perkembangan PDAM Kota Probolinggo pada tahun 1999 didasari kebijakan transisi nasional yang menekankan desentralisasi dan pemulihan pasca-krisis, dengan dampak ganda pada masyarakat, seperti adanya peningkatan akses dasar tapi dibayangi ketidakmerataan dan beban ekonomi. Perkembangan tersebut juga di dukung dengan adanya beberapa kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah yang berdampak positif untuk kepentingan masyarakat sekitar, antara lain.

---

<sup>57</sup> Emma Colven. "Thinking beyond success and failure: Dutch water expertise and friction in postcolonial Jakarta." *Environment and Planning C: Politics and Space*, 38 (2020): 961 – 979, di download melalui: <https://doi.org/10.1177/2399654420911947>.



1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah: Kebijakan ini mendesentralisasi wewenang pengelolaan utilitas ke daerah, termasuk PDAM, dengan alokasi dana 25% dari APBD untuk infrastruktur dasar. Di Kota Probolinggo ini memungkinkan pemerintah kota mengalokasikan sekitar Rp. 20-30 miliar untuk perbaikan jaringan air bersih. Hal ini berdampak kepada peningkatan otonomi lokal dan adanya keterlambatan implementasi yang menyebabkan ketergantungan bantuan terhadap pusat dan memperlambat adanya perluasan ekspansi pada pelayanan PDAM.<sup>58</sup>
2. Paket bantuan dari IMF dan program reformasi ekonomi, IMF menyalurkan dana sekitar US\$ 43 miliar (termasuk US\$ 150 juta tahap ketiga pada tahun 1999) untuk penyehatan PDAM nasional, dengan syarat restrukturisasi utang dan privatisasi parsial. Proses pendanaan rehabilitasi pipa senilai Rp. 15 miliar di Kota Probolinggo. Hal ini berdampak pada pengurangan kebocoran dari 30% menjadi 20%, tapi kenaikan tarif 15-20% (dari Rp.500/m<sup>3</sup> menjadi Rp.600/m<sup>3</sup>). Kenaikan biaya langganan ini tentunya membebani masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah pada waktu itu serta meningkatkan jumlah tunggakan menjadi 25%.
3. Keputusan Menteri PU Nomor 82 Tahun 1999 tentang penyehatan PDAM, merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Bantek (Bimbingan Teknis) penyehatan PDAM, yang berfokus pada efisiensi operasional dan kerjasama swasta (KPS). Di Tingkat daerah hal ini diintegrasikan dengan adanya Peraturan Daerah

---

<sup>58</sup> Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Probolinggo Nomor 13 tahun 1975. Dimana dalam hal ini berdampak dengan adanya peningkatan pada produksi air hingga 10-15%, tapi eksplorasi KPS gagal terealisasi karena adanya resistensi masyarakat terhadap Kebijakan privatisasi.<sup>59</sup>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (berdasarkan kebijakan tahun 1999) tentang pengelolaan kualitas air, meskipun diterbitkan tahun 2001, pada dasarnya konsepnya berdasarkan kebijakan pada tahun 1999 untuk masalah pengendalian pencemaran pasca krisis. Hal ini berdampak pada peningkatan standar desinfeksi di Ronggojalu, dan berkurangnya kasus diare hingga 15-20% pada waktu itu.<sup>60</sup>
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, kebijakan ini menjamin pembagian dana Pembangunan dan dana alokasi umum, termasuk sektor air bersih, hal ini berdampak pada PDAM yang memperoleh dana subsidi yang lebih stabil dari APBD.<sup>61</sup>
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang pedoman pengelolaan PDAM, kebijakan ini menjelaskan prinsip efisiensi, transparansi, dan orientasi pelayanan publik.<sup>62</sup>
7. Program Rehabilitasi Infrastruktur Air Bersih (1999-2001) program nasional pasca krisis untuk pemulihan layanan air minum perkotaan di Jawa Timur, termasuk Kota Probolinggo.

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia. (1999). Keputusan Menteri PU Nomor 82 Tahun 1999 tentang Penyehatan PDAM.

<sup>60</sup> Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan air.

<sup>61</sup> Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

<sup>62</sup> Kemendagri. (1999). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan PDAM.

8. Kebijakan Penataan Tarif Air Bersih Daerah (1999) kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuan masyarakat dan biaya operasional, memperkenalkan klasifikasi pelanggan untuk kebutuhan rumah tangga dan niaga.

Beberapa kebijakan pendukung diatas memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Kota Probolinggo. Krisis moneter pada tahun 1998 memperburuk ketergantungan masyarakat pada PDAM, dengan dampak multidimensi di tengah terjadinya inflasi dan angkat pengangguran 10-15%.

PDAM Kota Probolinggo sebagai perusahaan yang menyediakan air bersih dalam hal ini juga melaksanakan program kelestarian lingkungan sekitar sumber air Ronggojalu dengan penanaman bibit pohon serta menjaga kebersihan sekitar dari sampah yang dapat mengotori sumber air, dimana program ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan berdampak baik untuk keberlangsungan ekosistem distribusi air ke masyarakat Kota.

Pada kurun waktu 1999 juga Intensitas penggunaan air bersih di Probolinggo juga semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama di masa krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

<b>Tahun</b>	<b>Banyaknya Pelanggan</b>	<b>Banyaknya Air Minum yang di Produksi (M<sup>3</sup>)</b>	<b>Banyaknya Air Minum yang di Salurkan (M<sup>3</sup>)</b>	<b>Nilai (Rp.)</b>
1993	5174	2.386.540	1.746.342	529.529.740
1994	5.773	2.474.180	1.793.388	566.277.015
1995	6.498	2.607.505	2.119.492	665.248.490
1996	7.102	2.463.758	2.069.654	966.937.725
1997	7.621	2.611.686	2.199.946	1.091.999.575
1998	7.967	2.514.170	2.190.469	1.052.024.625

1999	8.360	2.631.620	2.281.129	1.434.753.690
------	-------	-----------	-----------	---------------

Tabel 4.1 Perkembangan jumlah pelanggan, jumlah air minum yang diproduksi dan di salurkan, serta pemasukan PDAM Kota Probolinggo tempo 1993-1999 .  
(Sumber: BPS Kota Probolinggo),  
Diakses 28 November 2025.

Dari tabel diatas menunjukkan adanya perkembangan serta penurunan dari pelayanan serta pemasukan PDAM Kota Probolinggo krisis moneter tahun 1997-1998 menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk perkembangan dan pemulihan PDAM Kota Probolinggo pasca krisis moneter setahun setelahnya pada tahun 1999. Adapun faktor penyebab lainnya disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca serta musim kemarau yang sering melanda Kota Probolinggo pada bulan-bulan tertentu seperti di Bulan Maret.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga Kota probolinggo terdapat pada bagian peningkatan jumlah layanan distribusi air dari tahun 1993 hingga tahun 1999. Namun, perkembangan tersebut mendapatkan kendala berupa penurunan jumlah pelanggan hingga penurunan jumlah pendapatan PDAM dikarenakan krisis moneter tahun 1997-1998. Tahun 1999 merupakan masa peralihan kepemimpinan orde baru berubah ke masa reformasi yang membuat peralihan kebijakan terkait pengelolaan dan perkembangan PDAM dalam mengelola distribusi air untuk kepentingan masyarakat Kota Probolinggo. Pada tahun 1993-1999 perkembangan lainnya terdapat pada peralihan sistem pompa distribusi air di PDAM Kota Probolinggo dimana sebelumnya masih mengandalkan menara air sebagai komponen utama dalam mengalirkan air langsung ke masyarakat lalu digantikan dengan pompa distribusi dengan tekanan yang lebih tinggi.

Dampak perkembangan perusahaan daerah air minum Bayuangga Kota Probolinggo bagi masyarakat sekitar adalah dengan terpenuhinya kebutuhan air masyarakat sekitar pinggiran pantai yang sebelumnya tidak terjangkau distribusi air dari PDAM. Meningkatnya kualitas air hasil distribusi PDAM yang dapat menunjang kesehatan masyarakat Kota Probolinggo serta bertambahnya jumlah pemasangan dan konsumsi air masyarakat Kota probolinggo dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## B. Saran

Pada penelitian skripsi ini peneliti merasa masih banyak terdapat aspek sosial budaya serta banyak aspek perkembangan hingga problematika dan kebijakan penunjang perkembangan yang belum diulas secara mendalam. Maka oleh sebab itu peneliti berharap penelitian ini menjadi dasar serta dorongan bagi penelitian skripsi dan karya tulis berikutnya dari bagian yang belum diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kota Probolinggo, *Menara Air Kota Probolinggo Sebagai Struktur Cagar Budaya*. Kota Probolinggo: Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kota Probolinggo. (2019).
- Kartodirdjo, S. *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta. Gramedia. (1992).
- Khalimah, *Probolinggo old dan now*, Kota Probolinggo: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo. (2018).
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana. (1995).
- Muller, P. *Les politiques publiques*. Paris: Presses Universitaires de France. (1990).
- Osborne, D. *Reinventing government*. Public productivity & management Review, (1993).
- Raap, Olivier Johannes. *Kota di Djawa Tempo Doeloe*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. (2015).
- Rogers, E. *Diffusion of Innovations 5th*. (2003).
- Rostow, W. W. *Politics and the Stages of Growth*. Cambridge University Press. (1971).
- Rostow, W. W. The stages of economic growth. In *Sociological Worlds*. Routledge. (2013).
- Setiono, Bambang. *Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Infrastruktur Daerah*. Jakarta: LP3ES. (1999).
- Tim penyusun, *Kota Probolinggo Menuju Masa Depan*. Kota Probolinggo: Pemerintah Kota Probolinggo. (2010).
- Tim penyusun, *Probolinggo Dalam Kantjah Revolusi*. Kota Probolinggo: Pemerintah Kota Probolinggo. (1978).
- Tim penyusun, *Probolinggo Tempo Dulu dan Kini*. Kota Probolinggo: Perencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kota Probolinggo. (2015).
- Tim penyusun, *Sejarah Kota Probolinggo Dari Waktu Ke Waktu*. Kota Probolinggo: Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo. (2010).



Todaro, M. P., & Smith, S. C. *Economic development*. Pearson education. (2015).

USAID. *Annual Report: Urban Water and Sanitation Reform Initiative – East Java*. (2000).

## **B. Skripsi**

Anisa Hidayati, Reni. “Perubahan Sosial Pada Masyarakat Lumajang Di Dunia Fotografi Tahun 1935-2011,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2024).

Firdausyul Hidayat, Alvin. “Relevansi Kebijakan Pemerintah No.69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium Terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2025).

Nafisa Salsabila, Nur. “Relokasi Lokalisasi sebagai Afirmasi Pemerintah Terhadap Masyarakat di Dusun Kaliputih Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2006-2021,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. . (2024).

## **C. Jurnal**

Agustriani, E. D. “Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TIRTA DHARMA Kota Pasuruan 1982-2004”. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(1). (2017).

Athoillah, M. R., & Suliyati, T. “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun 1986-2020”. *Historiografi*, 3(1). (2022).

Birsyada, M. I., & Syahrurah, J. K. “Social change in yogyakarta: past and now a selo soemardjan perspective”. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(1). (2018).

Booth, A. “Repelita V and Indonesia's medium term economic strategy”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 25(2). (1989).

Colven, E. “Thinking beyond success and failure: Dutch water expertise and friction in postcolonial Jakarta”. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 38(6). (2020).

Inglehart, R. Modernization, postmodernization and changing perceptions of risk. *International Review of Sociology*, 7(3). (1997).

Mashanda, Zafira. Asri, Zul. “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Solok Tahun 1984-2020”. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1). (2023).

- Mayshurah, T. E., & Sair, A. "Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda". *Journal of Urban Sociology*, 1(1). (2023).
- Sapto, A. "Kota Probolinggo pada masa menjelang dan awal revolusi". *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 2(1). (2012).
- Sukmana, W. J. "Metode penelitian sejarah". *Seri publikasi pembelajaran*, 1(2). (2021).
- Sumarto, M. "Insecurity and historical legacies in welfare regime change in Southeast Asia—Insights from Indonesia, Malaysia, and Thailand". *Social Policy and Society*, 19(4). (2020).
- Syaifutra, R. "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016". *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2(3). (2017).
- Verheijen, B., & Darma Putra, I. N. "Balinese cultural identity and global tourism: the Garuda Wisnu Kencana Cultural Park". *Asian Ethnicity*, 21(3). (2020).

#### D. Artikel Website

- Agustin, Inneke. "Sejarah Menara Air Randu Pangger, Dibangun untuk Menyuplai Air Bersih yang Menjadi Cikal Bakal Saluran PDAM Kota Probolinggo," dalam <https://radarbromo.jawapos.com/> 23 Juni 2024 (14 Mei 2025).
- Aziza, Raphel. "Mengenal Situs Benteng Mayangan, Jejak Sejarah Cikal Bakal Kota Probolinggo," dalam [https://jatim.akurat.co/wisata-kuliner/1353261185/mengenal-situs-benteng-mayangan-jejak-sejarah-cikal-bakal-kota-probolinggo#google\\_vignette](https://jatim.akurat.co/wisata-kuliner/1353261185/mengenal-situs-benteng-mayangan-jejak-sejarah-cikal-bakal-kota-probolinggo#google_vignette) 15 April 2025 (8 November 2023).
- Pemerintah Kota Probolinggo. "Sejarah Kota Probolinggo" dalam <https://probolinggokota.go.id/profil/sejarah-kota-probolinggo/> (19 November 2025 ).
- Pemerintah Kota Probolinggo. "Sejarah Kota Probolinggo" dalam <https://probolinggokota.go.id/profil/kondisi-demografi> (19 November 2025).
- Pemerintah Kota Probolinggo. "Sejarah Kota Probolinggo" dalam <https://bag-pemerintahan.probolinggokota.go.id/page/sejarah>, (31/12/2025).
- Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo. "Sejarah Perumdam Bayuangga" dalam <https://www.pudam-bayuangga.id/sejarah> (14 Mei 2025).
- Q.S. al-Anbiya (21): 30. dalam <https://quran.nu.or.id/al-anbiya>, (25 Desember 2025).

### **E. Wawancara**

Bapak Hadi Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Kota Probolinggo, 12 Maret 2025.

Bapak Supari, diwawancarai oleh penulis, Kota Probolinggo, 10 November 2025.

Bapak Supartono, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 8 November 2025.

Bapak Suyanto, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 3 Juni 2025.

Bapak Windis Eko Sambriansyah, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 8 November 2025.

Bapak Yudi Hermawan, diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Probolinggo, 8 November 2025.

### **F. Undang-undang**

Direktorat Jenderal Cipta Karya. (1995). Laporan Tahunan Pengembangan Air Bersih Nasional 1993–1995. Jakarta: Kementerian PU.

Kemendagri. (1999). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan PDAM.

Pemerintah Kota Probolinggo (1975). Mengatur tentang kebijakan daerah yang mengatur operasional PDAM.

Republik Indonesia. (1962). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang memberi landasan legal pendirian dan pengelolaan perusahaan milik daerah.

Republik Indonesia. (1974). Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan, menjadi landasan hukum utama pengelolaan sumber daya air.

Republik Indonesia. (1984). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Republik Indonesia. (1990). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyediaan Air Bersih.

Republik Indonesia. (1992). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah.

Republik Indonesia. (1993). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan umum.

Republik Indonesia. (1999). Keputusan Menteri PU Nomor 82 Tahun 1999 tentang Penyehatan PDAM.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

**G. Arsip ( dokumen tertulis, foto, dan lain-lain)**

Arsip PDAM Bayuangga. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (1993–1999). Probolinggo: PDAM Bayuangga.

Badan Pusat Statistika, Kota Probolinggo Dalam Angka 1993.

Badan Pusat Statistika, Kota Probolinggo Dalam Angka 1994.

Badan Pusat Statistika, Kota Probolinggo Dalam Angka 1995.

Badan Pusat Statistika, Kota Probolinggo Dalam Angka 1996.

Badan Pusat Statistika, Kota Probolinggo Dalam Angka 1997.

Badan Pusat Statistika, Kota Probolinggo Dalam Angka 1998.

Badan Pusat Statistika, Kota Probolinggo Dalam Angka 1999.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Banner Infografis Edukasi Mengenai Rumah Pompa dan Sumber Mata Air Ronggojalu. (Sumber: Dokumen peneliti, 23 Mei 2025).



Gambar 2. Info Grafis dari Postingan Media Resmi PDAM Kota Probolinggo. (Sumber: Pengurus Bagian Umum PDAM Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).



Gambar 3. Arsip Peraturan Daerah Pendirian PDAM Kota Probolinggo. (Sumber: Arsip PDAM Kota Probolinggo, 1 Agustus 2025).



Gambar 4. Kotamadya Probolinggo dalam Angka 1993. (Sumber: Arsip BPS Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).



Gambar 5. Kotamadya Probolinggo dalam Angka 1994.

(Sumber: Arsip BPS Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).



Gambar 6. Kotamadya Probolinggo dalam Angka 1995.

(Sumber: Arsip BPS Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).



Gambar 7. Kotamadya Probolinggo dalam Angka 1996

(Sumber: Arsip BPS Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).



Gambar 8. Kotamadya Probolinggo dalam Angka 1997

(Sumber: Arsip BPS Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).





Gambar 9. Kotamadya Probolinggo dalam Angka 1998

(Sumber: Arsip BPS Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).



Gambar 10. Kotamadya Probolinggo dalam Angka 1999

(Sumber: Arsip BPS Kota Probolinggo, 11 Agustus 2025).



Gambar 11. Sumber Air Ronggojalu.

(Sumber: Dokumen Peneliti, 23 Mei 2025).



Gambar 12. Pipa Produksi Air Ronggojalu.

(Sumber: Dokumen Peneliti, 23 Mei 2025).





Gambar 13. Rumah produksi Sumber Air Ronggojalu.

(Sumber: Dokumen Peneliti, 23 Mei 2025).



Gambar 14. Pipa Distribusi Utama dari Sumber Air Ronggojalu.

(Sumber: Dokumen peneliti, 25 Mei 2025).



Gambar 15. Foto Penampakan Pipa PDAM Tahun 1978 Kota Probolinggo yang sudah tidak digunakan lagi.

(Sumber: Dokumen Peneliti, 23 Mei 2025).



Gambar 16. Bangunan Menara Air Kota Probolinggo Tempo Kini.

(Sumber: Dokumen peneliti, 24 Mei 2025).



Gambar 17. Wawancara dengan Bapak Yudi Hermawan dan Bapak Supartono. Selaku Staf dan Kepala Bagian Umum Unit Produksi PDAM Kota Probolinggo.  
(Sumber: Dokumen peneliti, 8 November 2025).



Gambar 18. Wawancara dengan Bapak Windis Eko Sambriansyah. Selaku Staf Unit Produksi PDAM Kota Probolinggo.  
(Sumber: Dokumen peneliti, 8 November 2025).



Gambar 19. Wawancara dengan Bapak Indra Sovia Jalal dan Bapak Veri Erda Dedik Setyawan. Selaku Kepala Direktur PDAM Kota Probolinggo dan Kepala Staf Unit Ground PPI Wonoasih.  
(Sumber: Dokumen peneliti, 10 November 2025).



Gambar 20. Wawancara dengan Bapak Teguh Subandi dan Bapak Alfi Hidayat. Selaku Kapala Staf Unit Bagian Ground Menara-PPI dan Kapala Sataf Unit Bagian Perencanaan PDAM Kota Probolinggo  
(Sumber: Dokumen peneliti, 10 November 2025).



Gambar 21. Wawancara dengan Bapak Nuruddin dan Bapak Bagus Priyo Sambodo. Selaku Kasubag Umum dan Kasubag Kepegawaian PDAM Kota Probolinggo. (Sumber: Dokumen peneliti, 26 Mei 2025).



Gambar 22. Wawancara dengan Bapak Yulianto sujarwadi. Selaku Kepala Satuan Bagian Intern PDAM Kota Probolinggo (Sumber: Dokumen peneliti, 9 September 2025).



Gambar 23. Wawancara dengan Bapak Arief Harjianto. Selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Kota Probolinggo . (Sumber: Dokumen peneliti, 9 September 2025).



Gambar 24. Wawancara dengan Bapak Supari. Selaku Pensiunan Staf Teknisi Distribusi dan Perencanaan PDAM Kota Probolinggo (Sumber: Dokumen peneliti, 10 November 2025).



Gambar 25. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Dwi Ismail dan Ibu Dewi Anna Maria beserta Bapak M. Ikhwani Mukhlisin, Bapak Endy Setyo Lakosono, dan Bapak Nur Fajari. Selaku Kepala Bidang Kearsipan dan Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo.  
(Sumber: Dokumen peneliti, 8 November 2025).



Gambar 26. Wawancara dengan Ibu Khalimah. Selaku Penulis Buku Probolinggo Old & Now.  
(Sumber: Dokumen peneliti, 24 Mei 2025).



Gambar 26. Wawancara dengan Bapak Suryono. Selaku Ketua Tim Diseminasi, Pengolahan Data, dan Jaringan Badan Pusat Statistika Kota Probolinggo.  
(Sumber: Dokumen peneliti, 9 September 2025).



Gambar 27. Kunjungan ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.  
(Sumber: Dokumen peneliti, 22 Juli 2025).



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Sahrudin

NIM : 212104040019

Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 27 November 2025

Saya yang Menyatakan



Firman Sahrudin

NIM 212104040019

## BIOGRAFI PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Firman Sahrudin  
 Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 23 Januari 2003  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Desa Sumberkledung, Kecamatan Tegalsiwalan,  
 Kabupaten Probolinggo, RT 007/RW 002  
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
 Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam  
 NIM : 212104040019

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Sumberkledung II
2. SMP/MTS : SMPN I Tegalsiwalan
3. SMA/SMK/MA : SMA Taruna Dra. Zulaeha

### C. Pengalaman Organisasi

1. Kepala Bidang Rekominfo Himpunan Mahasiswa Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Periode 2023-2024.
2. Anggota Pengurus Bidang Komunikasi Ikatan Mahasiswa Bayuangga Probolinggo Periode 2023-2024.
3. Anggota Pengurus Bidang Komunikasi Divisi Perisai Diri Periode 2024-2025.